

**LAPORAN PENELITIAN**

**POLA INTERAKSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2013**



Oleh:

**Budi Setiyono, M.Pol.Admin, PhD**

Dibiayai Dari Sumber Dana Dipa UNDIP

Tahun Anggaran 2013

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2013**

# LAPORAN PENELITIAN

## POLA INTERAKSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2013



Oleh:

**Budi Setiyono, M.Pol.Admin, PhD**

Dibiayai Dari Sumber Dana DIPA UNDIP

Tahun Anggaran 2013

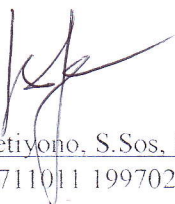
**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

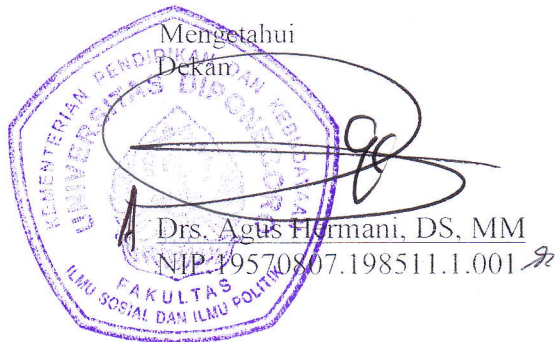
## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pola Interaksi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013
2. Kategori Tema : Demokratisasi
3. Bidang Ilmu : Politik/Pemerintahan
4. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Budi Setiyono, M.Pol.Admin, PhD
  - b. NIP/NIDN : 19711011 199702 1 001/0021057010
  - c. Jabatan Fungsional/Gol : Lektor / III C
  - d. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan
  - e. Alamat : Jl. Prof. Sudharto, SH. FISIP UNDIP Tembalang.
  - f. Telpon dan Faks : 024 8445464
  - g. Alamat Rumah : Perum Taman Setiabudi Blok Mediatama No. D 6 Semarang
  - h. Telpon/E-mail : 081901551199/bsetiyono@hotmail.com
5. Lokasi Penelitian : Propinsi Jawa Tengah
6. Lama Waktu Penelitian : 6 bulan
7. Biaya yang Diperlukan : Rp. 15.000.000,-
8. Sumber Dana : DIPA UNDIP Tahun Anggaran 2013


Semarang, 22 November 2013

Ketua Peneliti

  
Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin, PhD  
NIP.19711011 199702 1 001



Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Diponegoro

  
Prof. Drs. Imam Ghozali, M.Com.Akt., Ph.D  
NIP. 19580816 198603 1 002

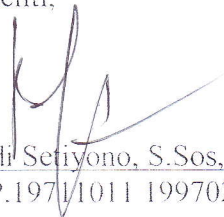
## KATA PENGANTAR

“Pola Interaksi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013” merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pola interaksi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 sebagai sebuah mekanisme demokrasi di ranah lokal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey.

Dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang dialami selama penelitian, peneliti mengucapkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan segala berkahnya sehingga penelitian ini bisa selesai sesuai rencana. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Drs. Agus Hermani, D. Suseno. MM. beserta jajaran pembantu dekan; keluarga besar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip; asisten peneliti, mahasiswa yang telah membantu mengambil data; serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Saya menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan, karenanya masukan dari pembaca sangat saya harapkan.

*Semarang, 22 November 2013*

Peneliti,



Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol,Admin, PhD  
NIP.19711011 199702 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Setiyono, M.Pol.Admin, PhD

NIP : 19711011 199702 1 001

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian yang saya susun dengan judul:

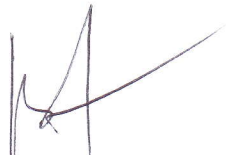
“Pola Interaksi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan  
Gubernur Jawa Tengah 2013”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 22 November 2013

Pembuat Pernyataan,



Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol,Admin, PhD  
NIP.19711011 199702 1 001

## ABSTRAK

*Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi merupakan salah satu faktor penting penanda keberhasilan demokrasi. Pilgub Jawa Tengah 2013 merupakan Pilgub kedua yang diselenggarakan secara langsung di Jawa Tengah. Bagaimana bentuk partisipasi dan pola interaksi masyarakat dalam Pilgub Jawa Tengah 2013 merupakan pertanyaan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode survey.*

*Hasil penelitian menunjukkan dalam hal partisipasi politik, pemilih di Jawa Tengah mayoritas merupakan pemilih yang tidak memiliki ikatan dengan partai politik secara langsung. Tidak ada hubungan yang pasti antara pilihan partai dalam Pileg 2009 dan Pilihan Pasangan dalam Pilgub. Mayoritas pemilih di Jawa Tengah dalam Pilgub merupakan pemilih yang pasif terhadap pemberitaan politik melalui berbagai media dan kampanye.*

*Kata Kunci : Partisipasi, Interaksi, Pilgub*

## ABSTRACT

*People's participation in the democracy process is one of important factors that marked democracy. Central Java 2013 Governor's Election is the second governor election in Central Java. The shape of public participation and interaction patterns in 2013 Central Java Governor Election is the main question in this research. This research used survey method.*

*The results showed in terms of political participation, the majority of voters in Central Java is those who were not engaged to any political party. There is no definite relationship between people's choice in political party in 2009 legislative election and in governor's election candidate. The majority of voters in Central Java in Pilgub were passive to political news through various media and campaigns.*

*Keywords: Participation, Interaction, Governor Election*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

ASBTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTARTABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kontribusi Penelitian.....	4
1.5. Luaran Penelitian.....	4
1.6. Tinjauan Pustaka.....	5
1.7 Definsi Konsep.....	11
1.7.1. Pilkada Langsung.....	11
1.7.2. Akuntabilitas Politik.....	12
1.7.3. Budaya Politik.....	12
1.8. Metode Penelitian.....	13
1.8.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	13

1.8.2. Populasi Penelitian.....	13
1.8.3. Sampel Penelitian.....	14
1.8.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	14
1.9. Keterbatasan Penelitian.....	15

## **BAB II GAMBARAN RESPONDEN DAN HASIL PILGUB**

2.1. Gambaran Responden.....	16
2.2. Hasil Pilgub Jawa Tengah 2013.....	23

## **BAB III EVALUASI PILGUB JAWA TENGAH 2013**

3.1. Partisipasi Politik Masyarakat.....	25
3.2. Persepsi Masyarakat Mengenai Pemerintahan Daerah.....	30
3.3. Pengetahuan Tentang Pilgub Jateng 2013– 2018.....	33
3.4. Aktifitas Politik.....	43
3.5. Keyakinan Terhadap Sistem Pemilu.....	52
3.6. Politik Uang Dalam Pilgub Jateng 2013 – 2018.....	59

## **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.

Nama pasangan Calon Gubernur-Wakil dalam Pilgub Jateng 2013.....2

Tabel II.1.

Sebaran Responden.....16

Tabel II.4.

Nama pasangan Calon Gubernur-Wakil dalam Pilgub Jateng 2013.....24

Tabel III.1.

Pilihan Partai dan Pilihan Gubernur.....36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	
Jenis Kelamin Responden.....	17
Gambar II.2	
Usia.....	18
Gambar II.3	
Pekerjaan .....	19
Gambar II.4	
Pendidikan .....	20
Gambar II.5	
Penghasilan.....	21
Gambar II.6	
Agama.....	22
Gambar II.1	
Organisasi Keagamaan .....	22
Gambar II.8	
Suku.....	23
Gambar III.1	
Anggota Parpol.....	25
Gambar III.2	
Partai Yang Diikuti.....	26
Gambar III.3	
Responden Memilih Di Pemilu.....	27

Gambar III.4	
Parpol Pilihan 2009.....	27
Gambar III.5	
Alasan Memilih Partai.....	28
Gambar III.6	
Apakah Akan Memilih Di Pemilu 2014.....	29
Gambar III.7	
Partai 2014.....	30
Gambar III.8	
Kinerja Pemprov Jateng Dalam Mensejahterakan Rakyat.....	31
Gambar III.9	
Masalah Paling Penting Yang Harus Diselesaikan Di Jateng.....	32
Gambar III.10	
Apakah Saudara Memilih Dalam Pilgub 2013?.....	33
Gambar III.11	
Alasan Tidak Memilih Pilgub.....	34
Gambar III.12	
Pasangan Yang Dipilih Dalam Pilgub.....	35
Gambar III.13	
Alasan Utama.....	38
Gambar III.14	
Tahu Visi Misi Cagub.....	39
Gambar III.15	
Sifat Kepemimpinan Yang Diharapkan Cagub.....	40

Gambar III.16	
Gubernur Terpilih Ganjar Pranowo Punya Sifat Yang Diharapkan.....	41
Gambar III.17	
Tahu Slogan “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.....	42
Gambar III.18	
Yakin Mampu Melaksanakan Slogan.....	42
Gambar III.19	
Sampai Saat Ini Puas Dengan Kinerja Gubernur Ganjar Pranowo.....	43
Gambar III.20	
Posisi Dengan Parpol.....	44
Gambar III.21	
Aktif Kegiatan Parpol.....	45
Gambar III.22	
Aktif Kampanye Pilgub.....	45
Gambar III.23	
Ikuti Berita Politik.....	46
Gambar III.24	
Baca Buku Politik.....	47
Gambar III.25	
Diskusi Masalah Politik.....	48
Gambar III.26	
Mengikuti Pendapat Tokoh.....	49
Gambar III.27	
Diadakan Debat.....	50

Gambar III.28	
Diadakan Kandidat Pembantu.....	51
Gambar III.29	
Kapan Saudara Memutuskan Untuk Memilih?.....	52
Gambar III.30	
Pelaksanaan Pilgub.....	53
Gambar III.31	
Menemukan Pelanggaran.....	54
Gambar III.32	
Kepuasan Terhadap Kinerja Parpol Dalam Menjaring Pasangan Cagub.....	55
Gambar III.33	
Kinerja KPU.....	56
Gambar III.34	
Kinerja Bawaslu.....	57
Gambar III.35	
Keyakinan Bahwa Gubernur Dapat Membawa Perubahan.....	58
Gambar III.36	
Sistem Pilgub Memungkinkan Terpilih Gubernur Yang Baik.....	59
Gambar III.37	
Sikap Terhadap Kandidat/Timses Yang Membagi Uang/Barang.....	60
Gambar III.38	
Bila Tidak Ada Kandidat Yang Memberi Uang.....	61
Gambar III.39	
Dalam Pilgub Apakah Terima Uang/Benar.....	61

Gambar III.40

Sikap Terhadap Kandidat Yang Memberi Uang/Barang.....62

Gambar III.41

Sikap Terhadap Timses Yang Tidak Jadi Beri Uang/Barang Yang Dijanjikan....63

Gambar III.42

Sikap Cagub Yang Membagi Uang Lalu Korupsi.....64

Gambar III.43

Rasionalitas Jumlah Uang/Barang Yang Oleh Cagub.....64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini, kepala-kepala daerah di Indonesia dipilih secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan sebelum tahun 2005, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat **Pilkada**.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat **Pemilukada**. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di

dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada tanggal 26 Mei 2013, Propinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur secara langsung untuk kali yang kedua. Pilgub Jateng 2013 akan diikuti oleh tiga pasang calon gubernur-wakil gubernur sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Nama pasangan Calon Gubernur-Wakil dalam Pilgub Jateng 2013**

<b>Nama Pasangan</b>	<b>Partai Pengusung</b>
Hadi Prabowo-Don Murdono	PPP, PKB, PKS, Gerindra, Hanura, dan PKNU
Bibit Waluyo-Soedijono	PD, Golkar, PAN
Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko	PDIP

Sumber: KPU Jateng (2013)

Secara teoritis, Pemilukada secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah karena mereka bisa memilih secara langsung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga dapat memperkuat proses demokratisasi di level lokal. Pilkada langsung membuka ruang bagi peningkatan tanggung jawab politik kepala daerah terpilih melihat Pemilukada

mendekatkan hubungan emosional kandidat dengan pemilih. Calon kepala daerah harus dapat membuat visi-misi yang mencerminkan kebutuhan dan kondisi daerah untuk dikampanyekan kepada pemilih. Selain itu, Pemilukada juga memberikan pendidikan politik kepada rakyat karena mendorong pemilih untuk bersikap kritis-analitis dalam menentukan pilihan alternatif kebijakan yang dibuat oleh para kandidat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: apakah konsep teoritis tentang Pilkada dapat berjalan secara baik pada tataran empirik? Kalau ya, apa variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilannya dan kalau tidak apa hambatannya? Apakah rakyat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan momentum Pilgub untuk memperjuangkan kepentingan mereka? Apakah elite partai dan kandidat akan bersikap akomodatif terhadap aspirasi masyarakat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana persepsi-persepsi publik terhadap pelaksanaan Pilgub.

- 2) Mengetahui ikatan pemilih dengan partai politik.
- 3) Mengetahui Keberhasilan/kegagalan Pemerintahan Daerah yang memiliki pengaruh terhadap pilihan politik dalam Pilgub.
- 4) Mengetahui pengaruh politik uang dalam Pilgub.
- 5) Mengetahui partisipasi pemilih dalam Pilgub.
- 6) Mengetahui pandangan pemilih terhadap penyelenggaraan Pilgub.

#### **1.4. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Penelitian ini akan berkontribusi untuk melihat bagaimana proses interaksi dan partisipasi pemilih dalam Pilgub Jateng 2013. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan melakukan eksplorasi terhadap model interaksi pemilih dalam memperjuangkan aspirasi mereka dalam proses Pilgub. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan Pilgub di masa yang akan datang.

#### **1.5. Luaran Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bisa menghasilkan luaran sebagai berikut:

- 1) Publikasi arikel di Jurnal nasional terakreditasi
- 2) Rekomendasi bagi peningkatan partisipasi pemilih

## 1.6. Tinjauan Pustaka

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara berhak memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi memungkinkan warga memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama-sama secara langsung atau melalui wakil-wakil terpilih-dalam proposal, pengembangan, dan penciptaan kebijakan dan hukum.

Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (Demokratia) "kekuasaan rakyat", yang diciptakan dari δῆμος (demo) "orang" dan κράτος (kratos) "kekuasaan" atau "aturan" pada abad ke-5 SM untuk menunjukkan sistem politik maka yang ada di negara-kota Yunani, terutama Athena, istilah ini anatominya ke ἀριστοκρατία (aristocratie) "aturan elit". Sebuah pemerintahan demokratis kontras dengan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh salah satu, seperti dalam monarki, atau dimana kekuasaan dipegang oleh sejumlah kecil individu, seperti dalam sebuah oligarki.

Ada beberapa varian demokrasi, dan salah satunya adalah demokrasi langsung, di mana semua warga negara berhak memiliki partisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dalam kebanyakan demokrasi modern, seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki kekuatan berdaulat, namun kekuasaan politik dilakukan secara tidak langsung melalui wakil-wakil terpilih, ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul sebagian besar dari

ide-ide dan lembaga-lembaga yang berkembang selama Abad Pertengahan Eropa, Abad Pencerahan, dan Revolusi Amerika dan Perancis.

Berbagai studi dan literatur politik menyebutkan bahwa Pilkada langsung dapat mendorong elit dan rakyat untuk terlibat dalam proses politik secara lebih aktif. Menurut Hill (2005) misalnya, demokrasi mengasumsikan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan pada akhirnya memberi legitimasi yang lebih kuat terhadap pengambilan kebijakan. Dalam demokrasi, terdapat kecenderungan sistem interaksi yang terpecah (*divergence*) dan bukannya terpusat (*convergence*), sehingga mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dengan standar kapasitas tertentu secara efektif.

Pelaksanaan Pemilu langsung memiliki hampir semua prasyarat dasar bagi praktek demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk memilih, adanya sumber informasi alternatif, hak bagi semua orang untuk menduduki jabatan publik, serta kelembagaan yang memungkinkan rakyat bisa mengontrol pemerintahan dan elit sebagai ciri-ciri demokrasi seperti dikemukakan oleh Dahl (1971: 3). Dalam Pemilu langsung, rakyat dapat memilih pemimpin yang memiliki personalitas dan program kerja yang dianggap paling dekat dengan kehendak publik atau konstituen. Menurut berbagai macam penulis (seperti Beetham 1996, Gaventa and Valderrama 1999, Cornwall and Gaventa 2001) proses demokrasi perlu diawali pada tingkat lokal karena pemerintah lokal memiliki potensi untuk mewujudkan demokratisasi secara lebih kongkrit. Hal ini karena otonomi

daerah mendorong terjadinya responsivitas, keterwakilan dan akuntabilitas yang lebih besar (Antlov 2004).

Sejalan dengan hal tersebut, mantan Ketua DPR Amerika Serikat Tip O'Neill mengatakan bahwa '*all politics is local*', yang mengandung arti bahwa demokrasi yang sesungguhnya ada (atau diawali) pada tingkat lokal dan kuat tidaknya demokrasi di level nasional ditentukan oleh dilaksanakannya nilai-nilai demokrasi di tingkat daerah. Pilkada langsung dipandang bisa mewujudkan makna tersebut sehingga penyelenggaraan Pilkada langsung dipandang dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan demokrasi di Indonesia.

Menurut Legowo (2005) dan Romli (2005) Pilkada langsung memiliki beberapa manfaat, yaitu: Pertama, mendorong tumbuhnya partisipasi politik daerah. Melalui Pilkada langsung, rakyat dapat terlibat langsung dalam menentukan siapa yang layak, memiliki kredibilitas, dan kapabilitas untuk memperjuangkan aspirasi dan memenuhi kepentingan rakyat. Proses semacam itu dapat menumbuhkan kesadaran rakyat bahwa merekalah pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya. Dalam hal ini rakyat dapat belajar untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan, sebab kesalahan memilih dapat membawa akibat buruk terhadap kehidupan mereka.

Kedua, mendorong kompetisi politik lokal yang fair. Melalui Pilkada langsung, monopoli politik dapat dicegah karena setiap orang (yang memenuhi syarat) dapat berkompetisi secara fair dan adil untuk menduduki jabatan yang ada. Dengan proses ini diharapkan tidak ada lagi kelompok atau suatu kontestan dari partai politik tertentu yang mendominasi secara terus menerus proses yang

berlangsung dan menutup ruang bagi kelompok lainnya untuk turut berkompetisi secara fair.

Ketiga, memperkuat legitimasi politik. Tidak seperti Pilkada melalui DPRD seperti yang dilaksanakan sebelumnya, Pilkada langsung dapat memberikan legitimasi yang kuat bagi kepemimpinan kepala daerah yang terpilih. Mekanisme pemilihan langsung memungkinkan refleksi kehendak publik secara riil untuk menentukan kepemimpinan elit. Apabila berlangsung fair, pilihan publik tersebut tidak bisa dimanipulasi oleh segelintir anggota DPRD. Dengan demikian kepala daerah terpilih akan diakui dan didukung oleh masyarakat. Pada akhirnya Pilkada langsung juga dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini karena kepala daerah yang terpilih memperoleh legitimasi kuat dari rakyat secara langsung, sehingga tindakan penghentian kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat dilakukan oleh DPRD.

Keempat, dapat meminimalisasi manipulasi dan kecurangan. Salah satu alasan yang mendorong penyelenggaraan Pilkada langsung adalah maraknya berbagai kasus suap dan berbagai bentuk kecurangan lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada oleh anggota DPRD. Wewenang untuk memilih kepala daerah oleh DPRD sebagaimana dahulu diatur dalam UU 22/1999 telah menyebabkan anggota DPRD terjebak dalam politik transaksional dengan para kandidat. Banyak diberitakan media massa pada saat itu, anggota DPRD menggunakan instrumen uang sebagai insentif bagi mereka memilih atau tidak memilih calon kepala daerah.

Kelima, meningkatkan akuntabilitas. Dengan Pilkada langsung, para kepala daerah berhadapan langsung dengan rakyat untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan mereka. Apabila rakyat sebagai pemilih menilai bahwa kepala daerah yang terpilih ternyata tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, maka dalam Pilkada berikutnya mereka akan memberikan sanksi dengan tidak memilihnya kembali.

Keenam, meningkatkan kapasitas politik. Bila berlangsung secara berkelanjutan, Pilkada langsung dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat di daerah untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri tanpa adanya intervensi dari siapapun, termasuk pemerintah dan/atau elit-elit politik di tingkat pusat. Pilkada langsung juga dapat memberikan latihan kepemimpinan bagi elit-elit lokal untuk mengembangkan kecakapannya dalam menyelenggarakan pemerintahan: merumuskan dan membuat kebijakan, mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat, berkomunikasi politik dengan masyarakat, serta melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Pada akhirnya akan lahir politisi-politisi atau pemimpin-pemimpin yang handal yang dapat bersaing di tingkat nasional.

Ketujuh, Pilkada langsung juga dapat menciptakan pola rekrutmen pimpinan lokal dengan standar mekanisme yang jelas. Pilkada langsung memungkinkan terjadinya rekrutmen pimpinan politik yang berasal dari daerah (lokal), bukan didrop dari pusat. Pilkada langsung mendorong rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpin-nya.

Demokrasi tentu memiliki berbagai macam kelemahan, termasuk misalnya tidak selamanya warga negara mampu memilih pemimpin dengan benar dan tepat. Dalam Pilkada langsung, bisa saja terjadi seorang calon kepala daerah yang populis (seperti artis dan tokoh masyarakat) dibantu oleh tim kampanye yang handal mungkin akan bisa memenangi pemilihan walaupun sebenarnya dia memiliki kemampuan teknis yang rendah sebagai manajer organisasi publik.

Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia juga menunjukkan adanya potensi konflik yang luar biasa. Konflik Pilkada bermuara pada tiga titik (Ikhsan 2007): Pertama, konflik struktural, yang disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya pilkada. Kedua, konflik kepentingan, yang disebabkan karena terjadinya persaingan kepentingan yang bertentangan dengan masalah kematangan psikologis. Ketiga, konflik hubungan, yang disebabkan karena adanya kesalahan persepsi atau salah komunikasi akibat terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Ikhsan (2007: 5) berpendapat bahwa intensitas konflik ketiga merupakan yang paling tinggi karena konflik tersebut terjadi di tingkat paling bawah dan terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam pola hubungan dalam mengakses sumber daya. Jika tidak dibuat mekanisme penyelesaian konflik secara baik, maka konflik-konflik Pilkada semacam itu akan dapat mengarah kepada pertikaian terus menerus dan menjurus pada lingkaran spiral yang destruktif dan berkembang menjadi suatu kerusuhan massal.

Akan tetapi demokrasi yang dipraktekkan dalam Pilkada langsung tetap memiliki keunggulan dalam memaksimalkan interaksi antara pemimpin dengan

pemilihan. Secara teoritis, konsep akuntabilitas (*accountability*) memiliki kesejajaran diametris dengan kemungkinan untuk melengserkan (*possibility to vote out*). Dengan demikian, seorang pemimpin dalam alam demokrasi harus betul-betul mampu melayani dan memenuhi kepentingan hidup rakyatnya dengan baik. Kondisi demikian tersebut tentu saja bukan sesuatu yang bersifat otomatis. Untuk dapat menjadikan pemimpin akuntabel, rakyat juga harus memiliki kapasitas politik yang memadai. Rakyat secara komunal harus bisa menciptakan budaya politik yang rasional dan partisipatif (Almond dan Powell, Jr1990; Verba 1963).

## **1.7. Definisi Konsep**

### **1.7.1 Pilkada Langsung**

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah wujud dari model pengisian pejabat publik oleh masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pemilik kedaulatan secara lebih konkrit. Sesuai dengan UU 32/2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, konstruksi pemilihan kepala daerah langsung meliputi frame sebagai berikut: 1) pemilihan dilakukan secara langsung yang mendekatkan hubungan pemilih dengan yang dipilih; 2) pelaksanaannya adalah KPUD; 3) dengan menggunakan format pilpres (PPK, PPS, KPPS, TPS); 4) adapun penyelesaian sengketa oleh MK; 5)

hasil akhir dengan keputusan KPUD; 6) serta pengesahan 30 hari setelah penetapan hasil.

### **1.7.2 Akuntabilitas Politik**

Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas pemerintah, pegawai negeri dan politisi kepada publik dan badan-badan legislatif seperti kongres atau parlemen. Dalam beberapa kasus, sistem recall dalam pemilu dapat digunakan untuk mencabut posisi pejabat terpilih. Umumnya, bagaimanapun, pemilih tidak memiliki cara langsung untuk memaksa politisi terpilih bertanggung jawab selama jangka waktu yang mereka telah terpilih. Akan tetapi, mereka dapat meminta pertanggungjawaban politisi melalui mekanisme pemilu: manakala politisi bekerja baik, pemilih akan memilih mereka kembali, dan apabila mereka bekerja buruk, pemilih akan menghukum mereka dengan tidak memilih.

### **1.7.3 Budaya Politik**

Budaya politik adalah seperangkat sikap, keyakinan dan sentimen yang memberikan perintah dan makna sebuah proses politik yang menyediakan asumsi dasar dan aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam sistem politik. Hal ini mencakup cita-cita politik dan norma-norma operasional pemerintahan.

Budaya politik dimanifestasikan dalam bentuk agregat dari dimensi psikologis dan subjektif dari pikiran dan kegiatan politik. Sebuah budaya politik adalah produk dari kedua sejarah kolektif dari suatu sistem politik dan sejarah kehidupan para anggota sistem dan dengan demikian berakar dalam kegiatan publik dan pengalaman pribadi.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survei dapat digunakan untuk maksud (1) penjajagan/eksploratif, (2) deskriptif. (3) penjelasan/ekplanatory atau confirmatory, yakni menjelaskan hubungan kausal dan menguji hipotesa, (4) evaluasi, (5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu dimasa yang akan datang, (6) penelitian operasional, dan (7) pengembangan indikator-indikator sosial<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Yogyakarta. 1987. hlm 3-4

### **1.8.2. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apapun yang menjadi objek dari survei<sup>2</sup>. Dalam penelitian ini populasi adalah pemilih dalam Pilgub Jateng 2013 yang berjumlah 27,3 juta orang.

### **1.8.3 Sampel Penelitian**

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti<sup>3</sup>. Survey ini menggunakan tingkat kepercayaan 96% dan Margin Error 5%, sehingga dari populasi 27,3 juta orang diperoleh jumlah sampel sebanyak 272 responden.

### **1.8.4. Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak bertingkat (*multistage random sampling*). Penggunaan teknik ini didasarkan atas, *pertama*, populasi relatif besar. *Kedua*, populasi relatif heterogen<sup>4</sup>. Pada level propinsi dipilih acak empat kabupaten, masing-masing kabupaten dipilih duakecamatan secara acak. Pada masing-masing kecamatan dipilih duadesa. Tiap desa dipilih tiga puluh empat responden.

---

<sup>2</sup>Eriyanto. *Teknik Sampling. Analisis Opini Publik*. LkiS. Yogyakarta. 2007. hlm 61

<sup>3</sup>Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. 1998. hlm 117.

<sup>4</sup>Ibid hlm 74

### **1.9. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lokus penelitian tentang pemilihan gubernur yang hanya di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, nature penelitian ini bersifat studi kasus yang mungkin tidak bisa digeneralisir untuk keseluruhan studi tentang pemilihan gubernur. Pendekatan kuantitatif menjadikan penelitian ini kurang mampu mengeksplor informasi tentang dinamika pemilih dalam proses pilgub secara mendalam.

## BAB II

### GAMBARAN RESPONDEN DAN HASIL PILGUB

#### 2.1. Gambaran Responden

Penelitian ini mengambil 272 responden yang tersebar di empat kabupaten yakni: Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Banyumas. Pemilihan daerah tersebut didasarkan pada letak geografis yang mencerminkan wilayah Jawa Tengah bagian Pantai Utara Barat (Kabupaten Pemalang), wilayah Pantai Utara Timur (Kabupaten Pati), wilayah tengah (Kabupaten Temanggung), dan wilayah selatan (Kabupaten Banyumas) sebagaimana dalam tabel 2.1.

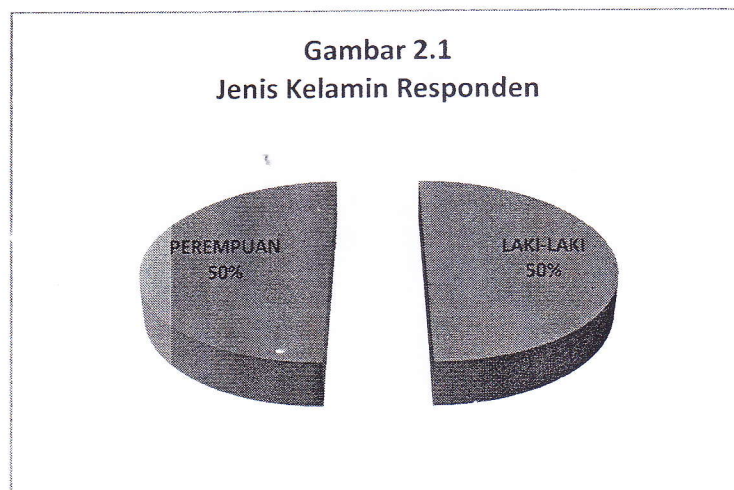
**Tabel 2.1**  
**Sebaran Reseponden**

Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Responden
Kab Pemalang	Pemalang	Sugihwaras	34
	Petarukan	Petarukan	34
Kab Pati	Pati	Parengan	34
	Winong	Tawangrejo	34
Kab Temanggung	Temanggung	Kelurahan Kebonsari	34
	Bulu	Bulu	34
Kab Banyumas	Patikraja	Patikraja	34
	Gumelar	Gumelar	34
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>			<b>272</b>

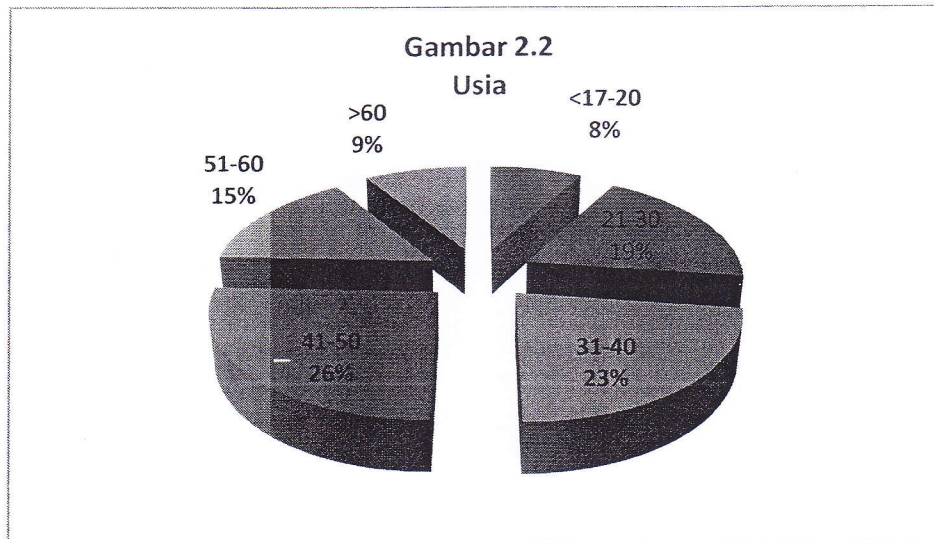
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Di masing-masing kab/kota dipilih dua kecamatan yakni kecamatan kota (pusat pemerintahan) dan kecamatan di wilayah perdesaan. Responden dalam satu kecamatan berasal dari satu desa.

Responden dalam penelitian ini 50 persen merupakan pemilih laki-laki dan 50 persen pemilih perempuan sebagaimana dalam gambar 2.1. Adapun responden dari sisi usia, sebagian besar merupakan pemilih dengan usia produktif (20-50 tahun) dengan rincian usia 17 tahun-20 tahun sebesar 8 persen, 21 tahun-30 tahun sebesar 19 persen, umur 31 tahun – 40 tahun sebesar 23 persen, umur 41 tahun – 50 tahun sebesar 26 persen, umur 51 tahun – 60 tahun sebesar 15 persen dan responden dengan umur lebih dari 60 tahun sebesar 9 persen, hal ini sebagaimana dalam gambar 2.2.

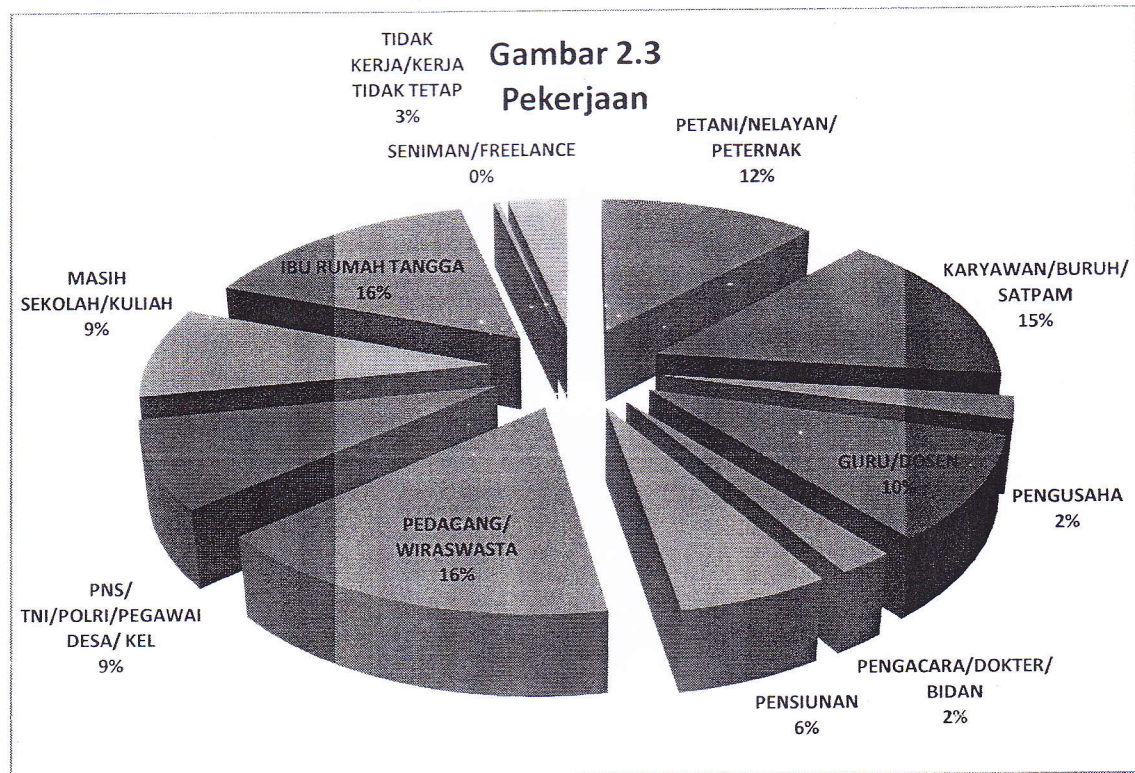


Sumber, diolah dari data penelitian 2013



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

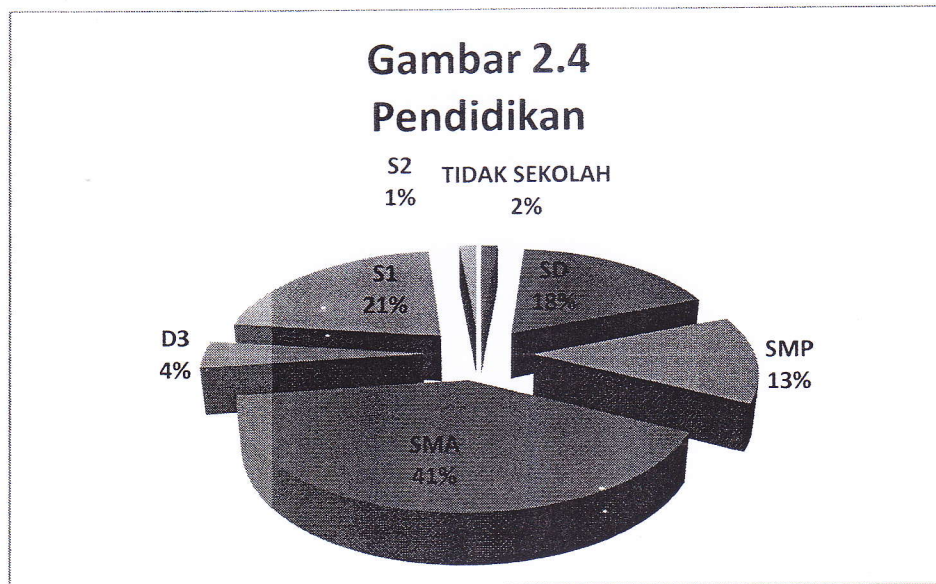
Latar belakang responden dari mata pencaharian memperlihatkan sebagian besar pemilih bekerja pada sektor informal dimana 16 persen bekerja sebagai pedagang/wiraswasta, 12 persen sebagai petani/nelayan/peternak, 15 persen sebagai karyawan/buruh/satpam, pengusaha sebesar 2 persen, guru/dosen sebesar 10 persen, pengacara/dokter/bidan sebesar 2 persen, responden dengan pekerjaan pensiunan sebesar 6 persen, pedagang/wiraswasta sebesar 16 persen, 9 persen bekerja sebagai PNS/TNI/Polri/Pegawai desa dan kelurahan, status pekerjaan responden masih sekolah/kuliah sebesar 9 persen, ibu rumah tangga 16 persen, responden dengan pekerjaan seniman/freelance tidak ada (0 persen) serta 3 persen responden tidak kerja/kerja tidak tetap, hal ini sebagaimana pada gambar 2.3.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

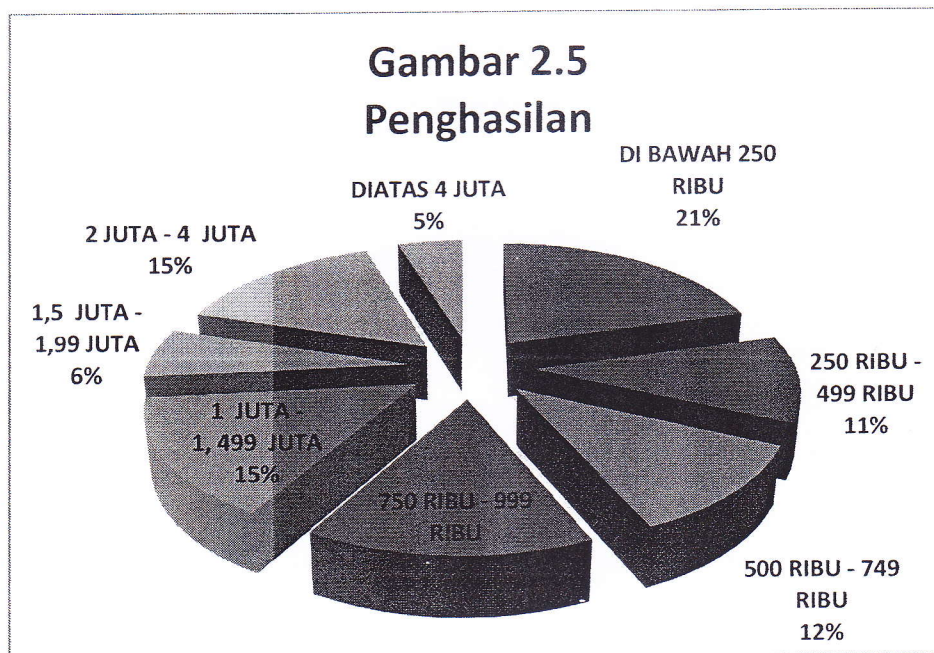
Melihat latar belakang responden berdasarkan pendidikan, responden terbanyak adalah responden yang berpendidikan SMA sebesar 41 persen, 2 persen tidak sekolah, pendidikan tamat SD sebesar 18 persen, responden dengan pendidikan tamat SMP sebesar 13 persen, pendidikan D3 sebesar 4 persen, 21 persen pendidikan S1 dan responden dengan pendidikan S2 sebesar 1 persen, hal ini dapat dilihat dari gambar 2.4 berikut ini.

**Gambar 2.4**  
**Pendidikan**



*Sumber, diolah dari data penelitian 2013*

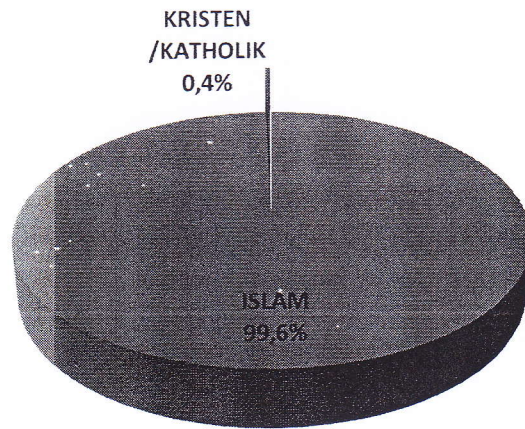
Berdasarkan data responden dengan latar belakang pekerjaan maka dapat kemudian dapat dideskripsikan latar belakang responden berdasarkan penghasilan. responden terbanyak adalah responden dengan penghasilan di bawah 250.000 sebesar 21 persen, kemudian 11 persen responden berpenghasilan 250.000 – 499.000 sebesar 11 persen, 12 persen responden berpenghasilan 500.000 – 749.000, responden dengan penghasilan 750.000 – 999.000, 1.000.000 – 1.499.000 dan 2.000.000 – 4.000.000 sama-sama 15 persen, penghasilan 1.500.000 – 1.999.000 sebesar 6 persen serta 5 persen untuk responden dengan penghasilan diatas 4.000.000, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut ini.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

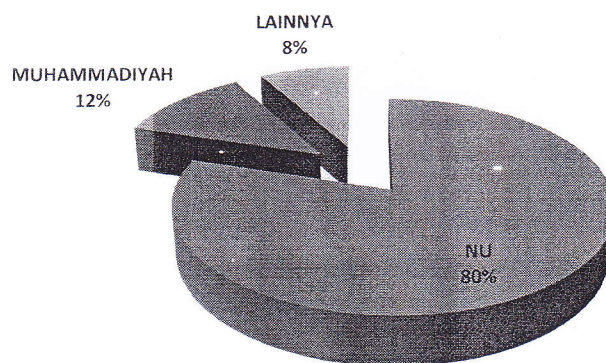
Latar belakang agama sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah responden dengan agama Islam yaitu sebesar 99,6 persen serta selebihnya sebesar 0,4 persen agama Kristen/Katholik, hal ini dapat terlihat pada gambar 2.6. Latar belakang responden berdasarkan agama tersebut dapat dideskripsikan berdasarkan organisasi keagamaan. Sebagian besar responden dengan latar belakang organisasi Nahdatul Ulama (NU) sebesar 80 persen, 12 persen responden berlatar belakang organisasi keagamaan Muhammadiyah dan 8 persen organisasi keagamaan lainnya, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut ini.

**Gambar 2.6**  
**Agama**



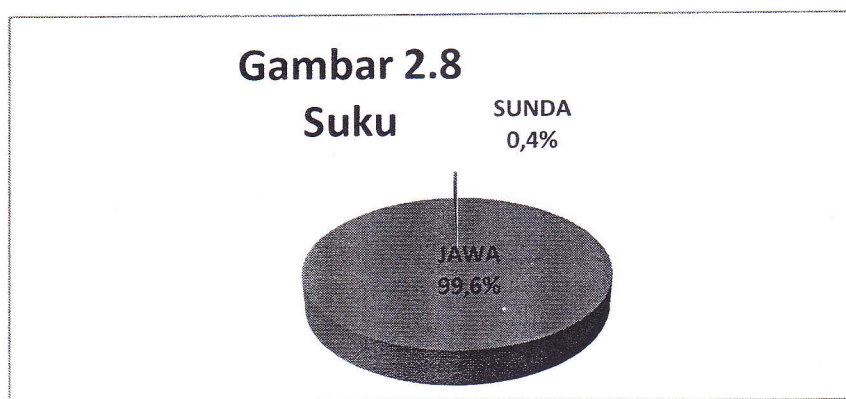
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

**Gambar 2.7**  
**Organisasi Keagamaan**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Responden dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari suku Jawa sebesar 99,6 persen serta 0,4 persen berasal dari suku Sunda. Hal ini dikarenakan mayoritas pemilih di Provinsi Jawa Tengah merupakan penduduk asli suku Jawa, hal tersebut dapat dilihat dari gambar 2.8 berikut ini.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

## 2.2. Hasil Pilgub Jawa Tengah 2013

Pilgub Jawa Tengah 2013 merupakan Pilgub secara langsung yang kedua digelar di Jawa Tengah. Dalam Pilgub tersebut tercatat jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah 27.385.985. Jumlah pemilih yang sudah berpartisipasi yakni 15.261.268 atau sebanyak 55,73 persen.

Partisipasi pemilih tertinggi adalah Kabupaten Temanggung dengan tingkat partisipasi 82,89 persen. Disusul Kabupaten Kudus sebanyak 79,26 persen. Sedangkan partisipasi terendah yaitu Kabupaten Pati yang hanya 44,52 persen.

Pilgub Jawa Tengah 2013 diikuti oleh tiga pasangan kandidat yakni pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono, Bibit Waluyo-Soedijono, dan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko sebagaimana dalam tabel 2.4.

**Tabel 2.4.**  
**Nama pasangan Calon Gubernur-Wakil dalam Pilgub Jateng 2013**

<b>Nama Pasangan</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Hadi Prabowo-Don Murdono	PPP, PKB, PKS, Gerindra, Hanura, dan PKNU	2.982.715 suara atau 20,92 persen.
Bibit Waluyo-Soedijono	PD, Golkar, PAN	4.314.813 suara atau 30,26 persen
Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko	PDIP	6.962.417 suara atau sebesar 48,82 persen

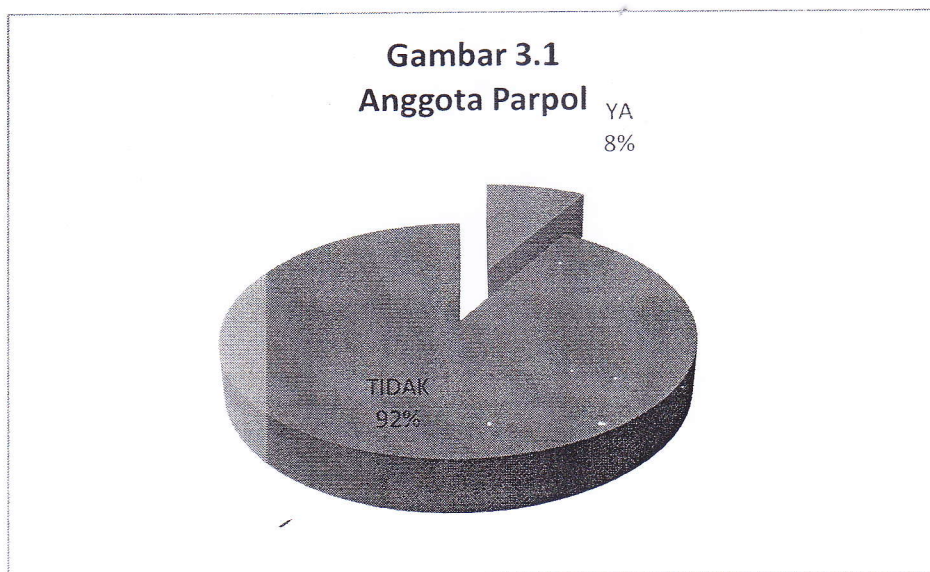
Sumber: KPU Jateng (2013)

Hasil Pilgub menunjukkan bahwa pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko memperoleh suara sebesar 6.962.417 suara atau sebesar 48,82 persen.

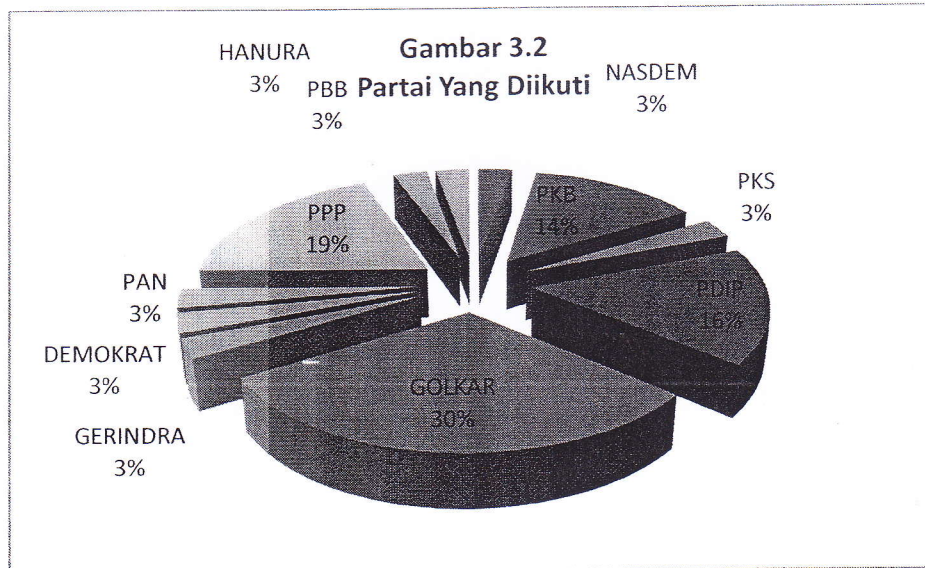
**BAB III**  
**EVALUASI PILGUB JAWA TENGAH 2013**

**3.1. Partisipasi Politik Masyarakat**

Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari ikatan masyarakat dengan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pemilih di Jawa Tengah merupakan pemilih yang tidak memiliki ikatan dengan partai politik hal tersebut dapat disimpulkan dari 92 persen responden yang menyatakan bukan merupakan anggota dari partai politik tertentu di Jawa Tengah sebagaimana dalam gambar 3.1. dimana partai yang diikuti oleh responden 30 persen partai Golkar, 19 persen PPP, PDIP 16 persen dan 14 persen PKB sebagaimana terlihat pada gambar 3.2.



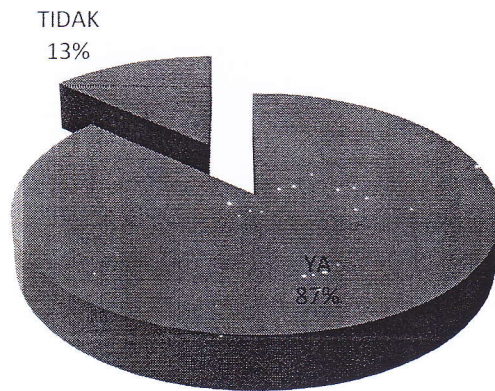
Sumber, diolah dari data penelitian 2013



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

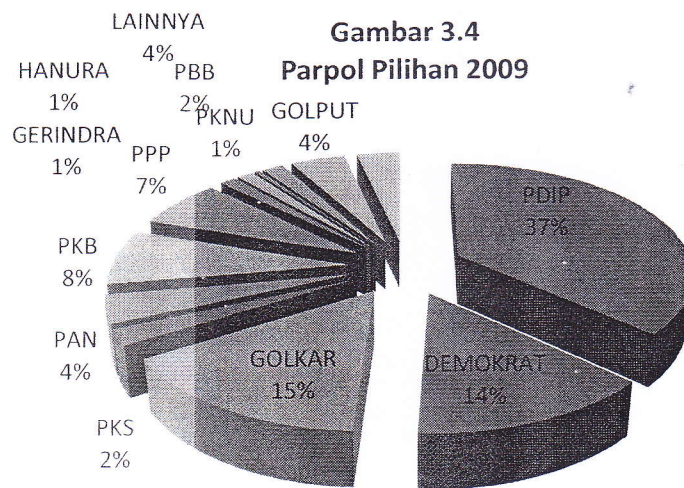
Dalam Pemilu 2009, sebagian besar responden (87 persen) menggunakan hak pilihnya sebagaimana dalam gambar 3.3, dimana 37 persen responden memilih PDIP, 15 persen memilih Golkardan 14 persen memilih Demokrat sebagaimana dalam gambar 3.4.

**Gambar 3.3**  
**Responden Memilih Di Pemilu 2009**



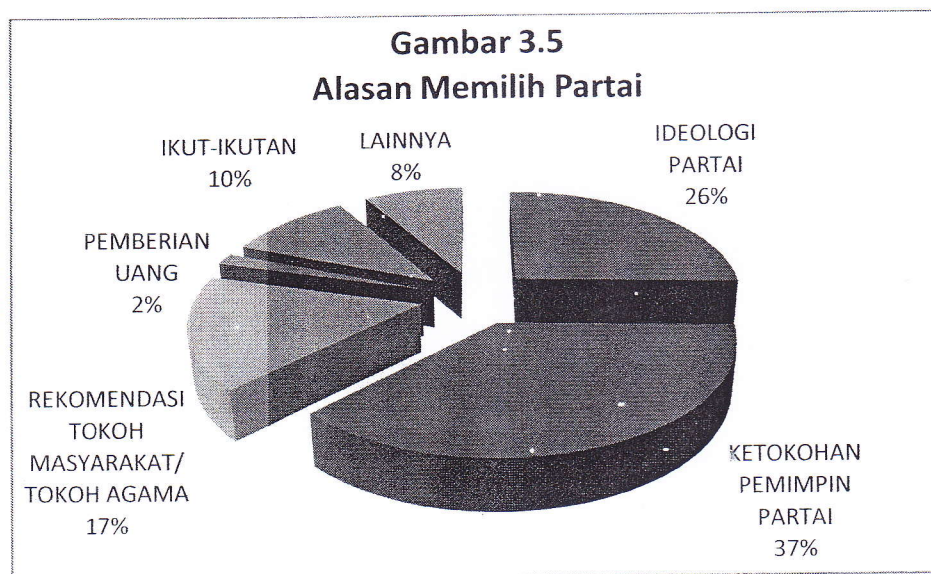
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

**Gambar 3.4**  
**Parpol Pilihan 2009**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Alasan responden dalam penelitian ini memilih partai yang diikuti dikarenakan ketokohan pemimpin partai dengan presentase 37 persen, 26 persen responden beralasan karena ideologi partai, 17 persen karena rekomendasi tokoh masyarakat/tokoh agama, 10 persen responden mengaku memilih partai tersebut karena ikut-ikutan, 8 persen karena alasan lainnya serta 2 persen responden memiliki alasan memilih partai tersebut karena pemberian uang, hal ini dapat dilihat dalam gambar 3.5 berikut ini.



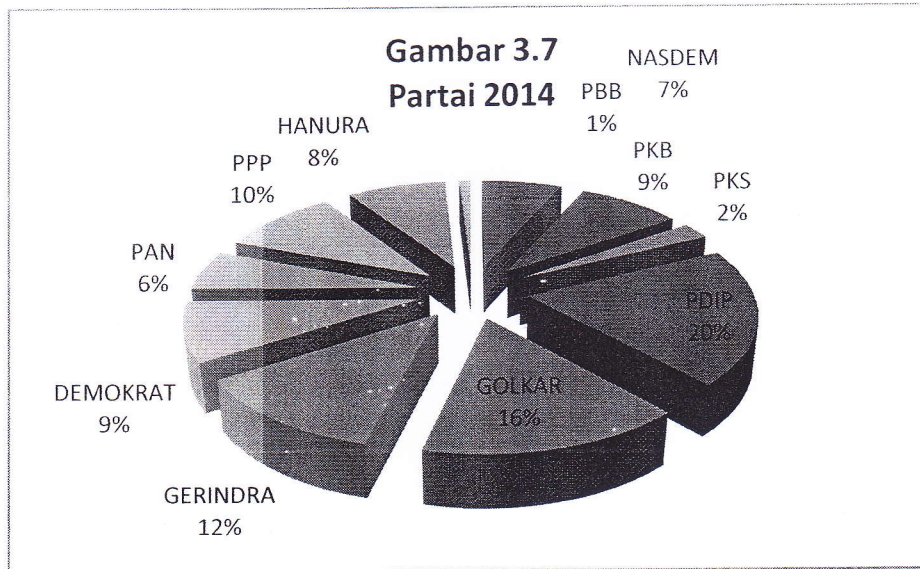
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Pada Pemilu 2014 mendatang sebagian besar responden (98 persen) akan menggunakan hak suaranya di TPS-TPS yang tersebar didaerahnya masing-masing sesuai dengan gambar 3.6. Dimana 20 persen responden akan memilih PDIP, partai

Golkar 16 persen, partai Gerindra 12 persen dan 10 persen responden akan memilih PPP yang terlihat pada gambar 3.7.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

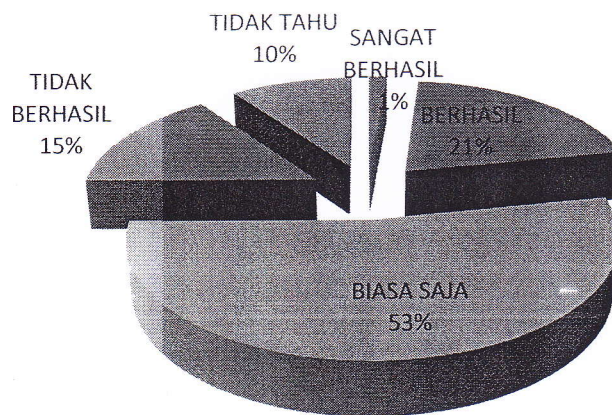


Sumber, diolah dari data penelitian 2013

### 3.2. Persepsi Masyarakat Mengenai Pemerintahan Daerah

Kinerja pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mensejahterakan masyarakat dapat dinilai berdasarkan penilaian masyarakat terhadap hasil dari kinerja tersebut. Pada penelitian ini sebagian besar responden menilai bahwa kinerja pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mensejahterakan masyarakat biasa saja dengan prosentase 53 persen, 21 persen menilai bahwa kinerja tersebut berhasil, 15 persen tidak berhasil, 10 persen tidak tahu dan 1 persen mengakui kinerja tersebut sangat berhasil, hal ini sesuai dengan gambar 3.8 berikut.

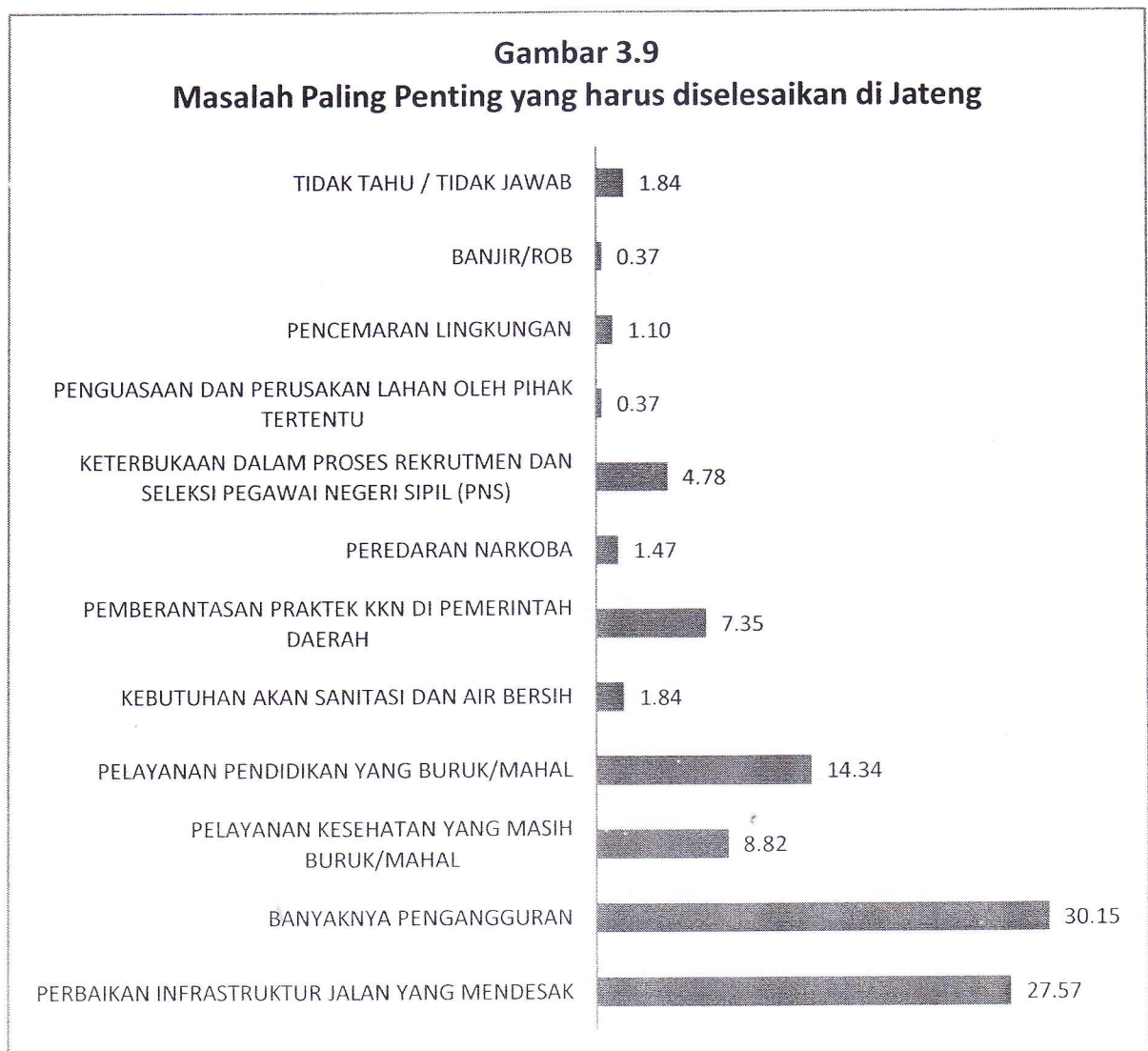
**Gambar 3.8**  
**Kinerja Pemprov Jateng Dalam Mensejahterakan Rakyat**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Bentuk dari kinerja pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mensejahterakan rakyat sangat tergantung pada masalah paling penting yang harus diselesaikan ditengah masyarakat Jawa Tengah. Responden dalam penelitian ini mengaku masalah yang paling penting dan harus diselesaikan di Jawa Tengah adalah banyaknya pengangguran dengan prosentase 30,15 persen, 27,57 persen masalah perbaikan infrastruktur jalan yang mendesak, 14,34 persen responden mengaku pada permasalahan pelayanan pendidikan yang buruk/mahal, 8,82 persen responden mengaku pelayanan kesehatan yang masih buruk/mahal, 7,35 persen berkaitan dengan pemberantasan praktek KKN di pemerintah daerah, 4,78 persen berkaitan dengan keterbukaan dalam proses rekrutmen dan seleksi PNS, 1,84 persen berkaitan dengan kebutuhan akan sanitasi dan air bersih, selebihnya peredaran narkoba (1,47

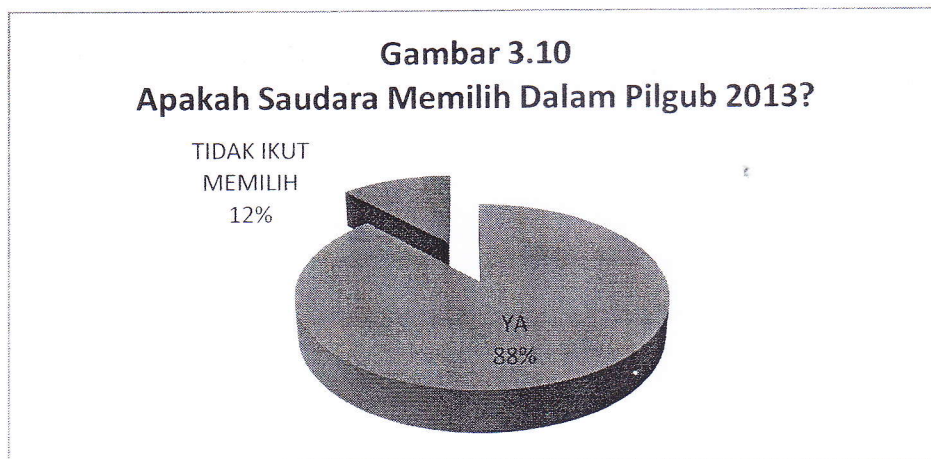
persen), pencemaran lingkungan (1,10 persen), banjir rob dan penguasaan dan perusakan lahan oleh pihak tertentu (0,37 persen) serta 1,84 persen responden menjawab tidak tahu. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar 3.9 berikut ini.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

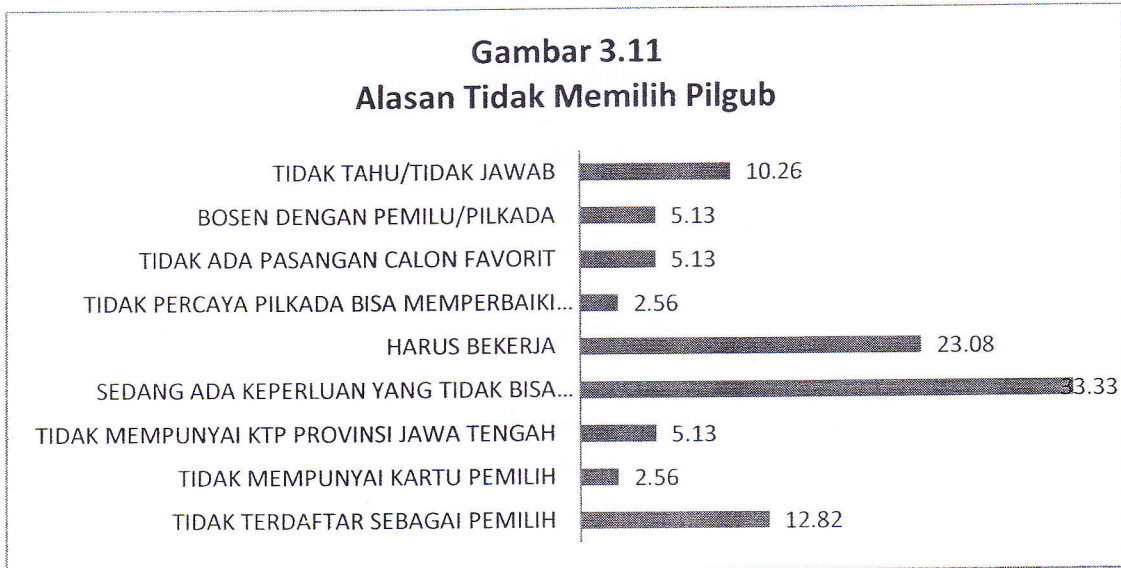
### 3.3. Pengetahuan Tentang Pilgub Jateng 2013– 2018

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebagian besar responden (88 persen) menggunakan hak pilih mereka dan selebihnya 12 persen responden tidak ikut memilih sebagaimana pada gambar 3.10. Alasan responden tidak ikut memilih pada Pilgub Jateng 2013 dikarenakan sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan (sebesar 33,33 persen), 23,08 persen dikarenakan harus bekerja, 12,82 persen tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilgub Jateng 2013, 10,26 persen menjawab tidak tahu/tidak jawab, alasan tidak ikut memilih karena bosan dengan pemilu/pilkada, tidak ada pasangan calon favorit dan tidak mempunyai KTP provinsi Jawa Tengah masing-masing prosentasenya 5,13 persen, serta selebihnya tidak percaya Pilkada bisa memperbaiki keadaan Provinsi Jawa Tengah dan Tidak mempunyai kartu pemilih masing-masing prosentasenya 2,56 persen sebagaimana tergambar pada gambar 3.11.



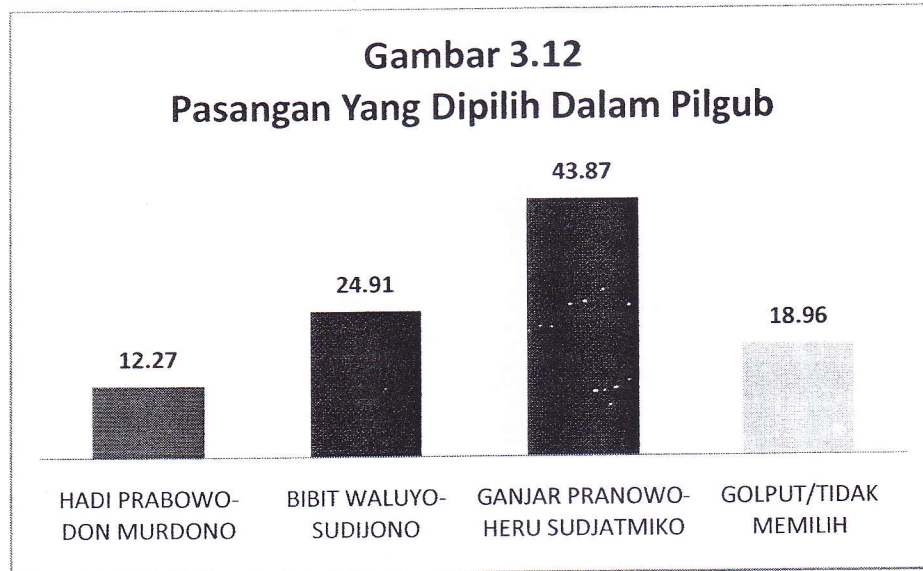
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

**Gambar 3.11**  
**Alasan Tidak Memilih Pilgub**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Pada gambar 3.12 berikut ini menggambarkan pasangan yang dipilih responden dalam Pilgub Jateng 2013, 43,87 persen responden memilih pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmiko, 24,91 persen memilih pasangan Bibit Waluyo-Sudjiono, 12,27 persen memilih Hadi Prabowo-Don Murdono dan selebihnya 18,96 persen golput/tidak memilih.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Alasan responden memilih pasangan yang dipilih pada Pilgub Jateng 2013 tersebut 35,83 persen karena alasan visi dan misinya bagus dan mampu mengatasi masalah, 15,35 persen karena orangnya berwibawa dan perhatian, 9,45 persen responden mengaku memilih pasangan tersebut karena ikut dengan orang lain, 8,27 persen dikarenakan yakin dia akan menang, 5,51 persen karena rekomendasi dari tokoh agama, 4,33 persen karena berasal dari partai yang sama, 1,57 persen karena berasal dari keturunan/keluarga tokoh masyarakat, 0,97 persen karena pemberian (uang, sembako, rokok, dll), dan selebihnya 12,20 persen karena tidak mengetahui alasan/tidak menjawab dan 6,67 persen karena alasan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.13.

Dilihat dari latar belakang pemilih, kemenangan Pasangan Ganjar Pranowo sangat ditentukan oleh pemilih PDI Perjuangan dalam Pemilu 2009, mayoritas pemilih yang memilih PDI Perjuangan dalam Pileg 2009 kembali memilih pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Hal tersebut juga bisa menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki tingkat kesolidan sangat kuat jika dibandingkan dengan partai-partai lainnya dalam menggerakkan mesin politiknya.

Partai Demokrat yang mengusung pasangan Bibit Waluyo nampaknya tidak solid, hal tersebut terbukti dengan 52,3 persen pemilih partai Demokrat yang memilih pasangan Ganjar sebagaimana dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Pilihan Partai dan Pilihan Gubernur**

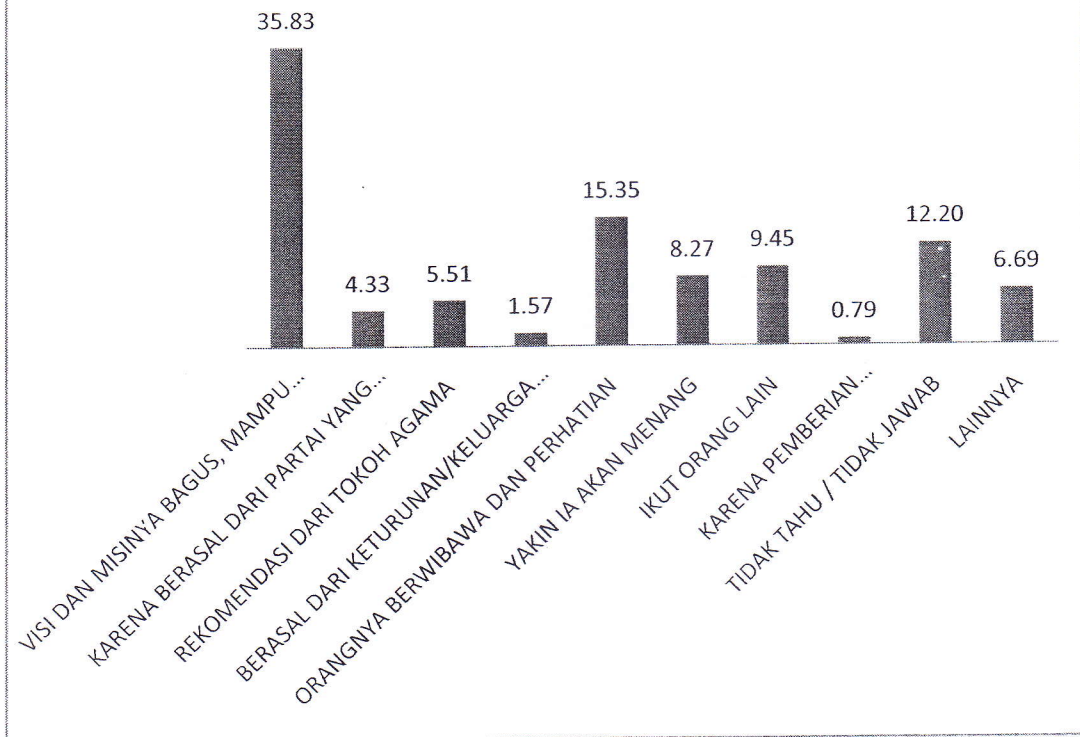
		PASANGAN PILGUB			
		HADI PROBOWO- DON MURDONO	BIBIT WALUYO- SUDIJONO	GANJAR PRANOWO- HERU SUDJATMIKO	GOLPUT/TIDAK MEMILIH
<b>PARPOL 2009</b>	DEMOKRAT	8,3	30,9	52,3	8,5
	PDIP	0	9,3	81,2	9,5
	GOLKAR	26,4	50	20,5	3,1
	PKS	0	0	60	40
	PAN	33,3	22,2	44,4	0,1
	PKB	5,5	22,2	61,1	10,9
	PPP	31,25	18,75	31,25	18,75
	GERINDRA	33,3	33,3	33,3	0,1
	HANURA	33,2	66,7	0	0
	PKNU	0	0	100	0

Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Tabel 3.1 juga menunjukkan tidak adanya korelasi yang pasti antara pilihan partai dalam Pileg 2009 dengan pilihan kandidat dalam Pilgub 2013.

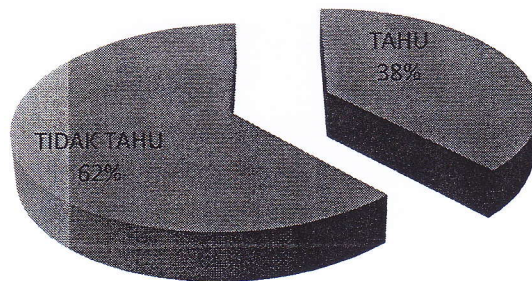
Gambar 3.14 menjelaskan seberapa tahu responden terhadap visi dan misi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dipilih dalam pilkada Jatng tahun 2013. Sebagian besar (62 persen) responden tidak tahu visi dan misi pasangan calon serta selebihnya 38 persen responden mengetahui visi dan misi pasangan calon tersebut.

**Gambar 3.13**  
**Alasan Utama**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

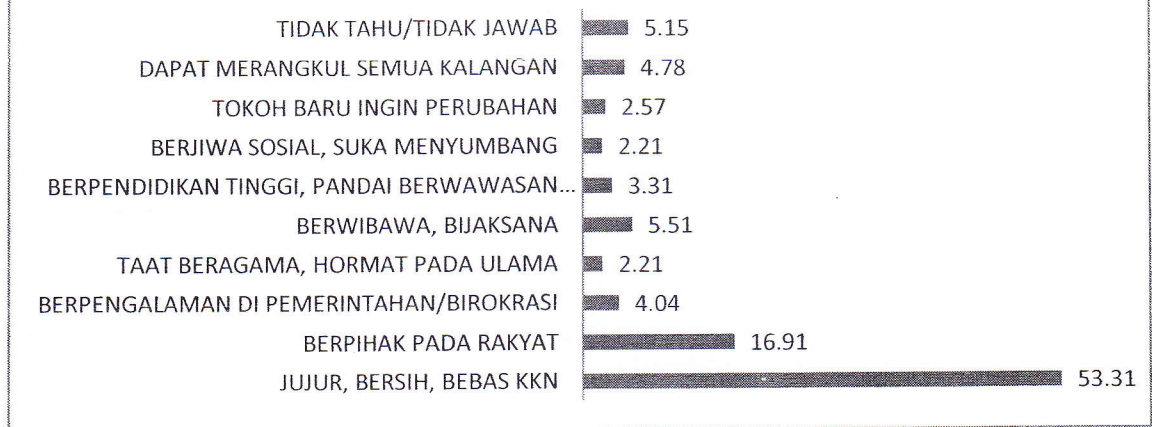
**Gambar 3.14**  
**Tahu Visi Misi Cagub**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Sifat kepemimpinan yang diharapkan masyarakat dari seorang calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Jawa Tengah digambarkan pada gambar 3.15, sebagian besar responden dengan prosentase 53,31 persen mengharapkan pemimpin yang jujur, bersih dan bebas KKN, 16,91 persen responden mengharapkan pemimpin yang berpihak pada rakyat, 5,51 persen mengharapkan pemimpin yang berwibawa dan bijaksana, 4,78 persen mengharapkan pemimpin yang dapat merangkul semua kalangan dan selebihnya berpengalaman di pemerintahan/birokrasi (4,04 persen), berpendidikan tinggi, pandai dan berwawasan luas (3,31 persen), tokoh baru ingin perubahan (2,57 persen), serta berjiwa sosial dan suka menyumbang serta taat beragama dan hormat pada ulama masing-masing 2,21 persen.

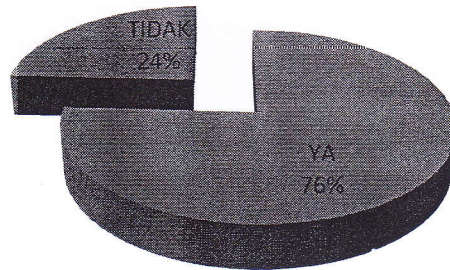
**Gambar 3.15**  
**Sifat Kepemimpinan yang diharapkan Cagub**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Berdasarkan uraian harapan sifat kepemimpinan dari seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diatas, gubernur terpilih Ganjar Pranowo memiliki sifat yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan prosentase sebesar 76 persen responden dalam penelitian ini sebagaimana pada gambar 3.16.

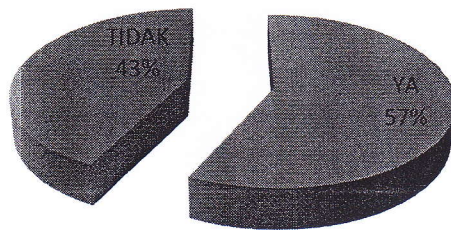
**Gambar 3.16**  
**Gubernur Terpilih Ganjar Pranowo Punya**  
**Sifat yang diharapkan**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

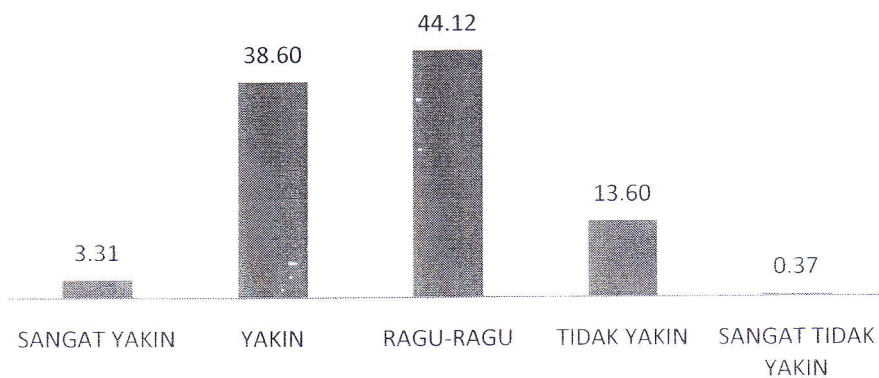
Sebagian besar responden mengetahui slogan gubernur terpilih Ganjar Pranowo “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” dengan prosentase sebesar 57 persen dan 43 persen tidak mengetahuinya sebagaimana terlihat pada gambar 3.17. Selain itu pada gambar 3.18 tingkat keyakinan responden terhadap slogan Ganjar Pranowo tersebut menyebutkan bahwa 44,12 persen responden ragu-ragu terhadap slogan tersebut, 38,60 persen responden yakin, 13,60 persen responden tidak yakin terhadap slogan tersebut, 3,31 persen sangat yakin dan 0,37 persen responden sangat tidak yakin.

**Gambar 3.17**  
**Tahu Slogan Mboten Korupsi Mboten**  
**Ngapusi**



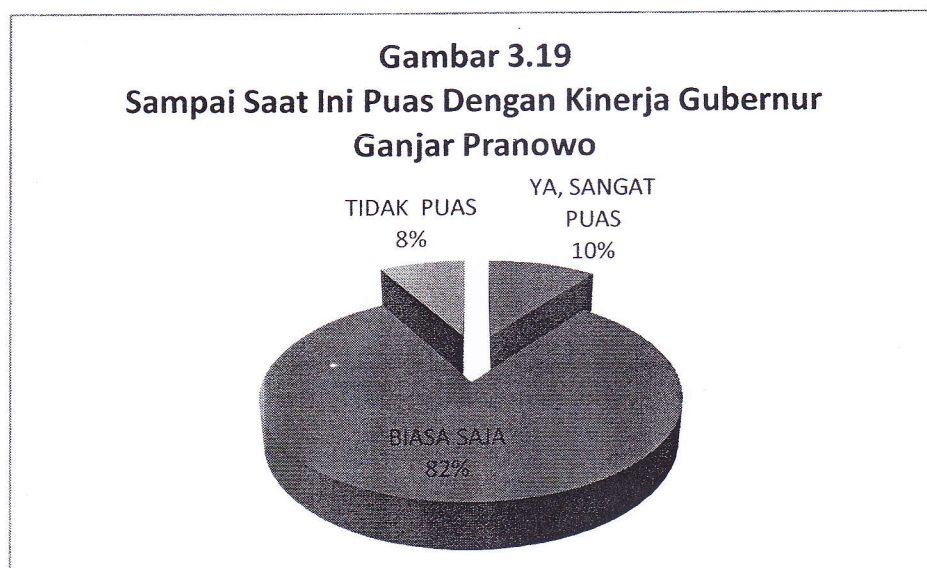
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

**Gambar 3.18**  
**Yakin mampu melaksanakan slogan**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

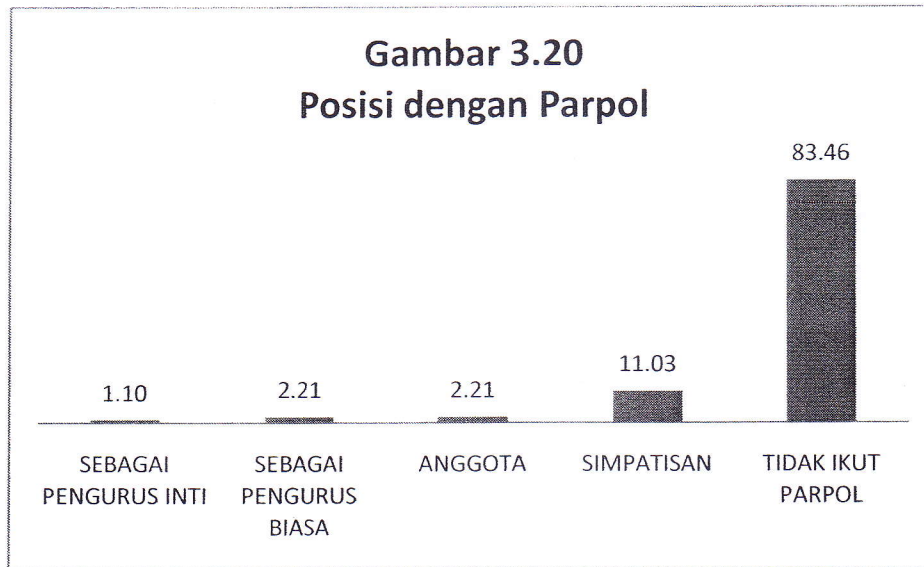
Tingkat kepuasan responden terhadap kinerja gubernur Ganjar Pranowo sampai saat ini sebagian besar responden (82 persen) biasa saja kinerjanya, 10 persen menjawab sangat puas dan 8 persen selebihnya tidak puas, hal ini sesuai dengan gambar 3.19 berikut.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

### 3.4. Aktifitas Politik

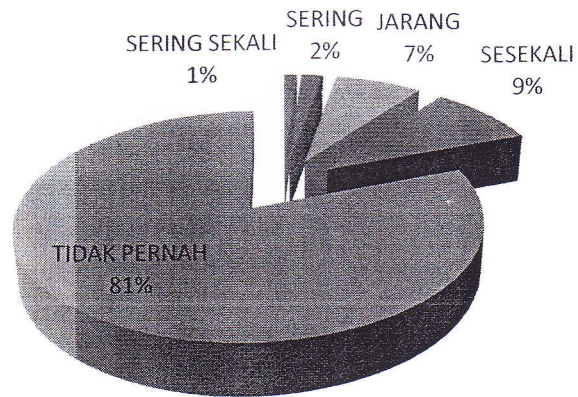
Posisi responden dengan partai politik pada penelitian ini dapat tergambar pada gambar 3.20 dimana 83,46 persen responden tidak ikut sebagai partai politik, 11,03 persen sebagai simpatisan, 2,21 persen responden mempunyai hubungan dengan partai politik sebagai anggota dan sebagai pengurus biasa, serta 1,40 persen responden mempunyai posisi dengan partai politik sebagai pengurus inti.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

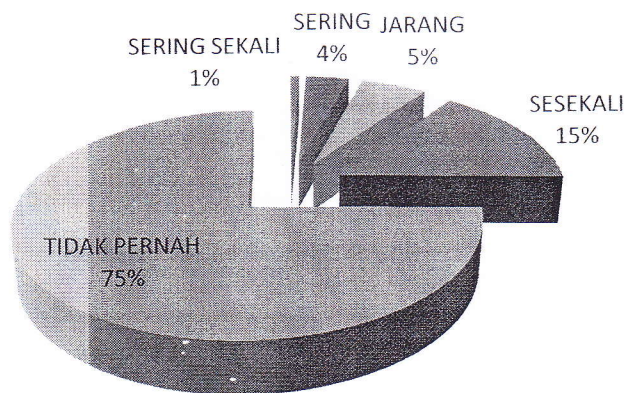
Prosentase terbesar responden berkaitan dengan keaktifannya terhadap kegiatan partai politik, 81 persen responden tidak pernah aktif dalam kegiatan partai politik, 9 persen sesekali aktif kegiatan partai politik, 7 persen jarang, 2 persen sering dan 1 persen sering sekali terlibat dalam kegiatan partai politik sebagaimana tergambar pada gambar 3.21. Keaktifan tersebut juga dapat dicontohkan sebagai kegiatan kampanye seperti pada kampanye pilgub Jawa Tengah 2013. Sebesar 75 persen responden tidak pernah aktif kampanye pilgub Jateng 2013, 15 persen sesekali mengikuti kampanye tersebut, 5 persen jarang, 4 persen sering dan 1 persen sering kali mengikuti kampanye Pilgub Jawa Tengah 2013 yang digambarkan pada gambar 3.22.

**Gambar 3.21**  
**Aktif Kegiatan Parpol**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

**Gambar 3.22**  
**Aktif Kampanye Pilgub**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

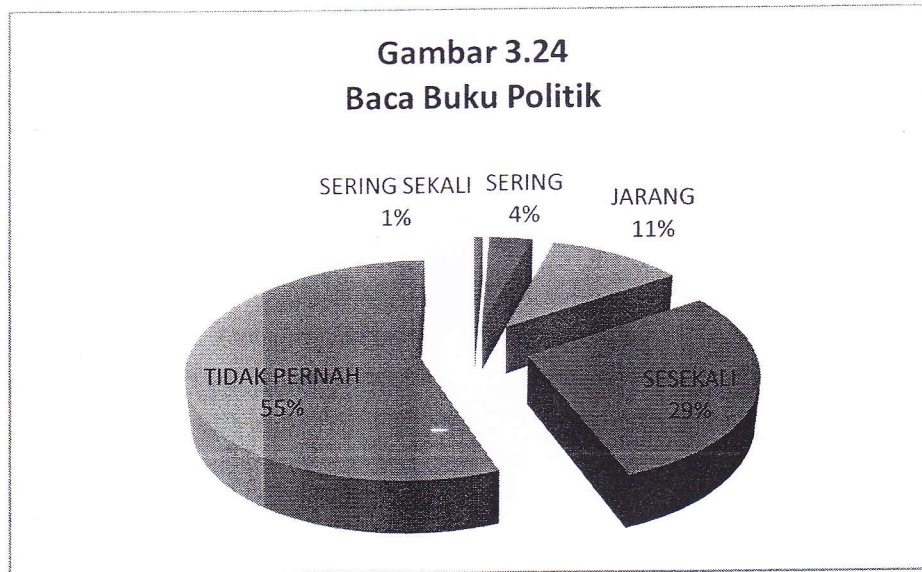
Gambar 3.23 menjelaskan keseringan responden mengikuti berita politik di media massa (koran, majalah, TV dan radio), 35 persen responden sesekali mengikuti berita politik di media massa, 23 persen jarang mengikuti, responden dengan prosentase 21 persen tidak pernah mengikuti berita, 15 persen responden sering dan 6 persen sresponden sering sekali mengikuti berita politik di media massa.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Untuk memperkaya pendidikan politik responden membaca buku politik adalah alternatif untuk kegiatan tersebut, dalam penelitian ini 55 persen responden tidak pernah membaca buku tentang politik, 29 persen sesekali membaca buku politik, 11 persen jarang, 4 persen sering dan 1 persen sering sekali membaca buku tentang politik sebagaimana terlihat pada gambar 3.24.

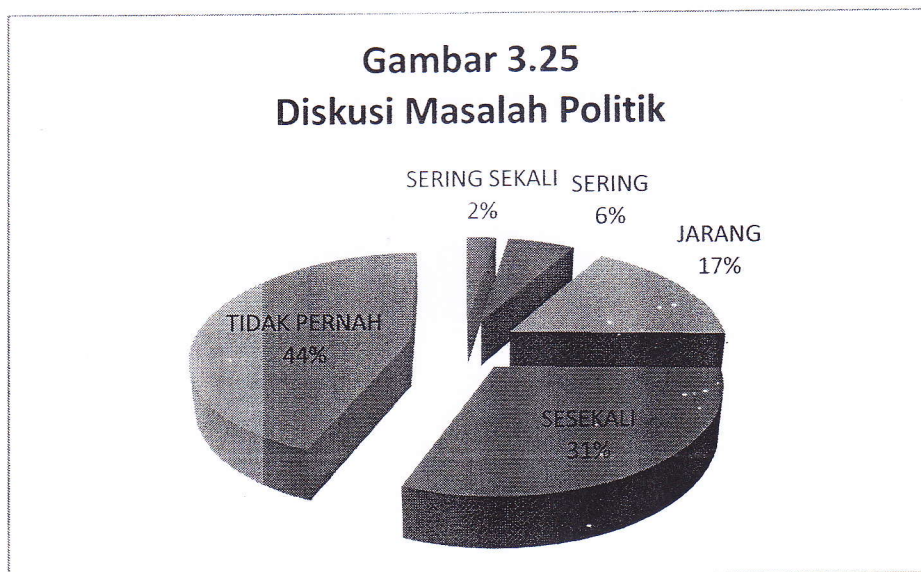
**Gambar 3.24**  
**Baca Buku Politik**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Selain membaca buku politik, diskusi masalah politik juga dapat memperkaya pengetahuan tentang politik masyarakat. Salah satu indikator dalam penelitian ini berkaitan dengan responden melakukan diskusi masalah politik dengan orang lain. 44 persen responden tidak pernah berdiskusi mengenai masalah politik, 31 persen sesekali, 17 persen jarang, 6 persen sering dan 2 persen sering sekali melakukan kegiatan diskusi masalah politik dengan orang lain. Hal tersebut tergambar pada gambar 3.25 berikut.

**Gambar 3.25**  
**Diskusi Masalah Politik**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Responden dengan 38 persen menjawab tidak mengikuti pendapat tokoh masyarakat dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, selain itu 28 persen hanya mendengarkan pendapat tersebut, 21 persen sama sekali tidak mengikuti pendapat tokoh, 11 persen mengikuti dan 2 persen sangat mengikuti pendapat para tokoh masyarakat dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, sebagaimana pada gambar 3.26 berikut ini.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Gambar 3.27 menjelaskan dengan adanya diadakan debat kandidat pasangan calon dalam pilgub Jawa Tengah 2013. Responden dengan prosentase 65 persen setuju diadakannya debat tersebut, 13 persen sangat setuju, 11 persen ragu-ragu, 10 persen tidak setuju dan 1 persen sama sekali tidak setuju dengan diadakannya debat kandidat pasangan calon dalam pilgub Jawa Tengah 2013. Dengan adanya debat kandidat tersebut diharapkan masyarakat dan khususnya masyarakat Jawa Tengah lebih mengetahui sosok calon pemimpin mereka. Sebagian besar responden (54 persen) dengan adanya debat kadidat tersebut dapat membantu masyarakat mengenal para calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, 17 persen menjawab sangat membantu, 15 persen ragu-ragu, 13 persen tidak membantu dan 1 persen sangat tidak membantu dengan diadakannya debat kandidat terebut sebagai upaya

masyarakat mengenal para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 sebagaimana pada gambar 3.28.

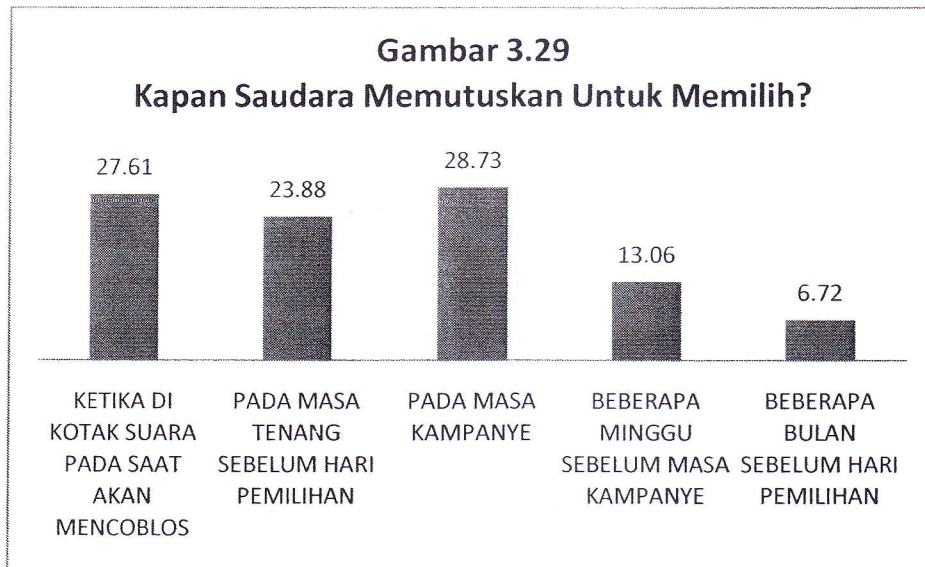


Sumber, diolah dari data penelitian 2013



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Ketika pada hari pencoblosan masyarakat menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan TPS masing-masing, responden dalam penelitian ini memutuskan untuk memilih pasangan kandidat berbeda-beda pilihan dan waktu memutuskannya. 28,73 responden memutuskan untuk memilih kandidat pasangan calon tersebut ketika masa kampanye, 27,61 persen ketika di kotak suara pada saat akan mencoblos, 23,88 persen pada masa tenang sebelum hari pemilihan, 13,06 persen beberapa minggu sebelum masa kampanye dan 6,72 persen beberapa bulan sebelum hari pemilihan, hal tersebut sesuai dengan gambar 3.29 berikut.



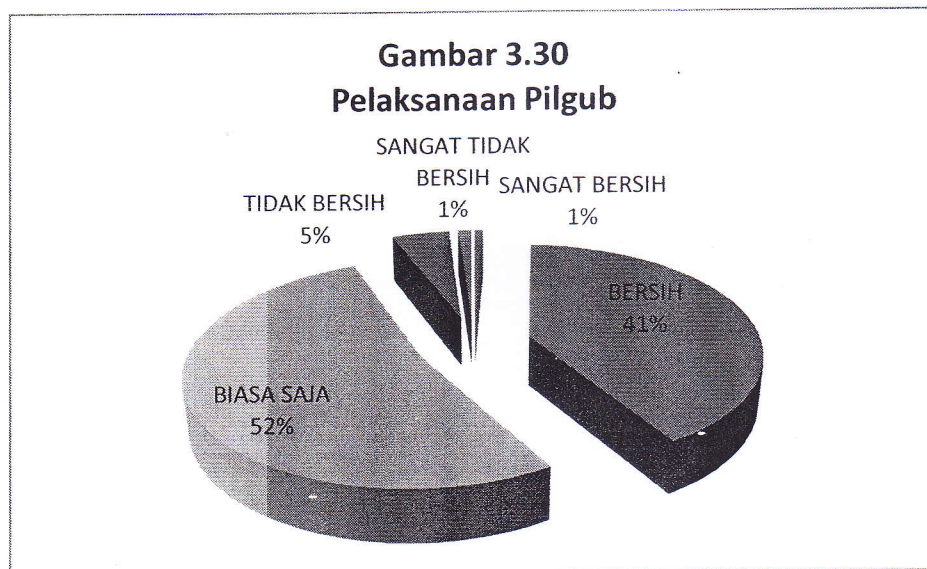
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

### 3.5. Keyakinan Terhadap Sistem Pemilu

Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pilgub Jawa Tengah 2013 dapat dilihat pada gambar 3.30, dimana 52 persen responden menjawab pelaksanaan pilgub Jawa Tengah pada 26 Mei 2013 biasa saja, 41 persen menjawab pelaksanaannya bersih, 5 persen menjawab tidak bersih serta 1 persen menjawab sangat bersih dan sangat tidak bersih pada pelaksanaan pilgub Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 2013.

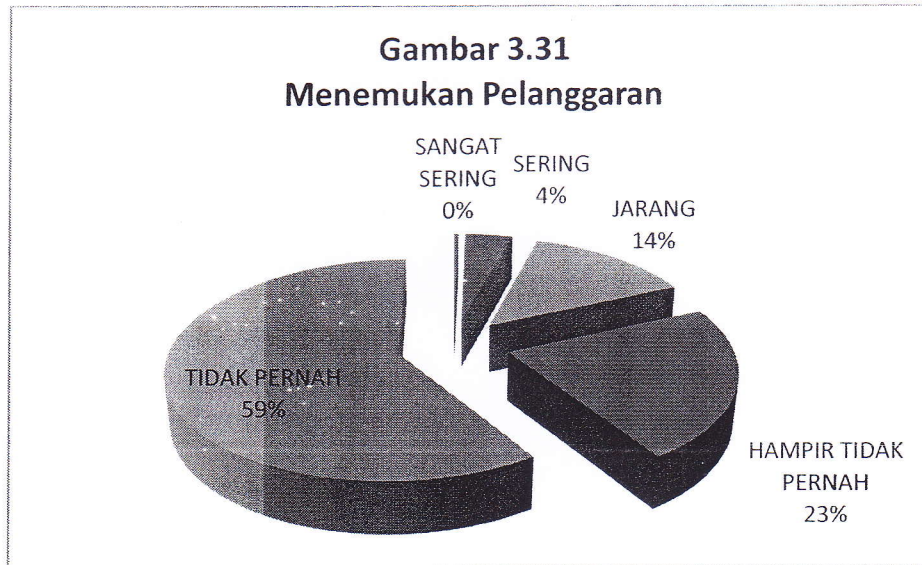
Pada pelaksanaan pilgub Jawa Tengah pada 26 Mei 2013 berkaitan dengan temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses maupun para kandidat. Terlihat pada gambar 3.31 59 persen responden dalam penelitian ini menyebutkan tidak pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng sebelum hari pemilihan, 23 persen menyebutkan hampir tidak

pernah, 14 persen jarang dan 4 persen menyebutkan sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng sebelum hari pemilihan.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

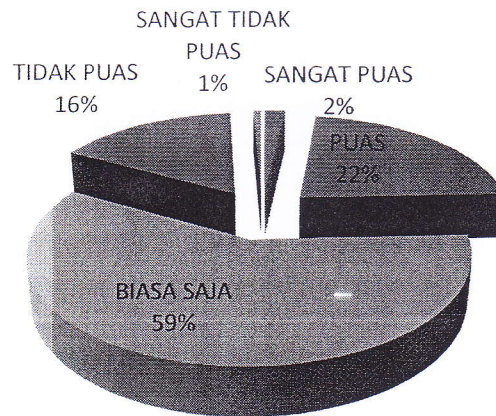
**Gambar 3.31**  
**Menemukan Pelanggaran**



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

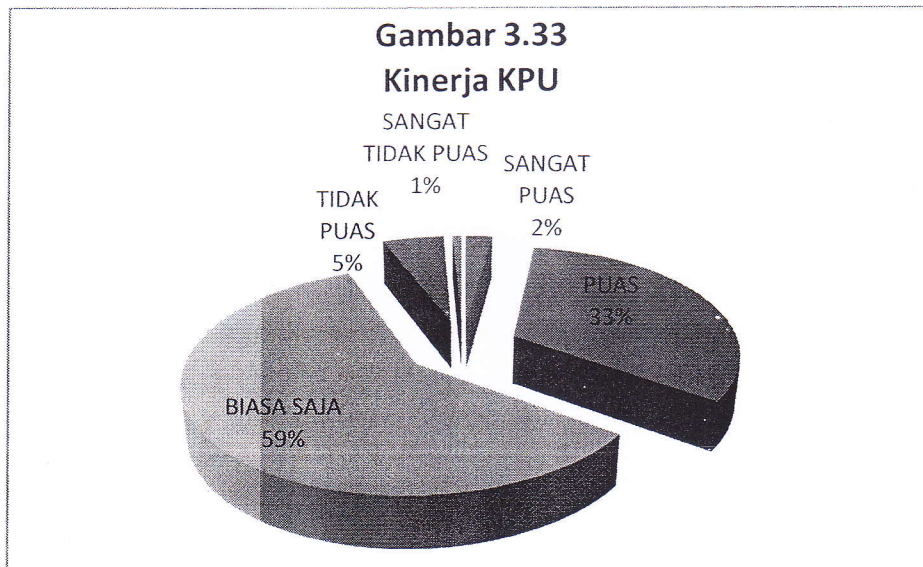
Persaingan para kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 tidak terlepas dari proses penjaringan yang dilakukan oleh partai politik di Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan kunci utama agar melahirkan pemimpin yang unggul. Penilaian masyarakat dalam hal ini adalah responden penelitian ini menyebutkan 59 persen responden merasa biasa saja, 22 persen puas, 16 persen tidak puas, 2 persen sangat puas dan 1 persen sangat tidak puas dengan kinerja partai politik dalam menjaring kandidat dalam Pilgub 2013, sebagaimana terlihat pada gambar 3.32 berikut.

**Gambar 3.32**  
**Kepuasan Terhadap Kinerja Parpol Dalam Menjaring**  
**Pasangan Cagub**



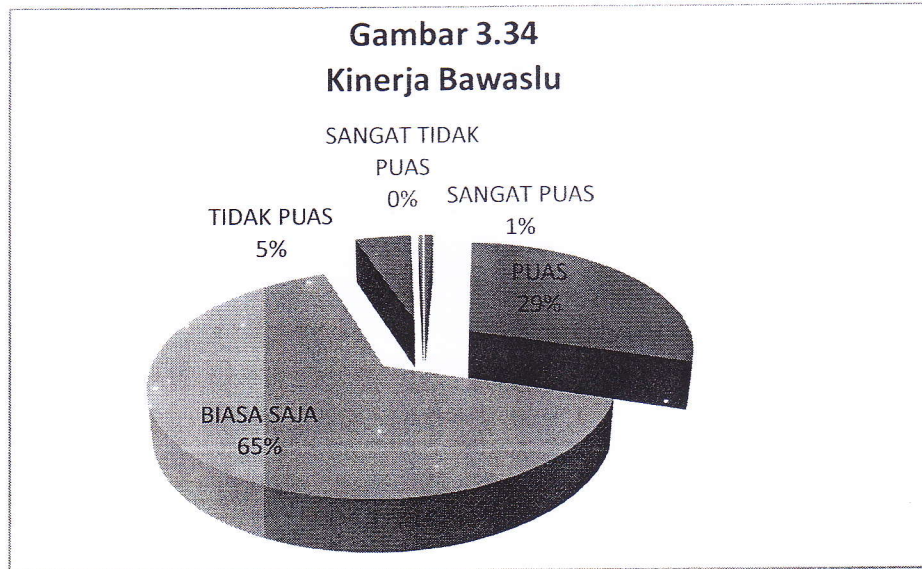
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Gambar 3.33 menjelaskan pendapat kepuasan responden terhadap kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebagian besar (59 persen) responden merasa biasa saja dengan kinerja KPU tersebut, 33 persen merasa puas, 5 persen tidak puas, 2 peren sangat puas dan 1 persen merasa sangat tidak puas dengan kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.



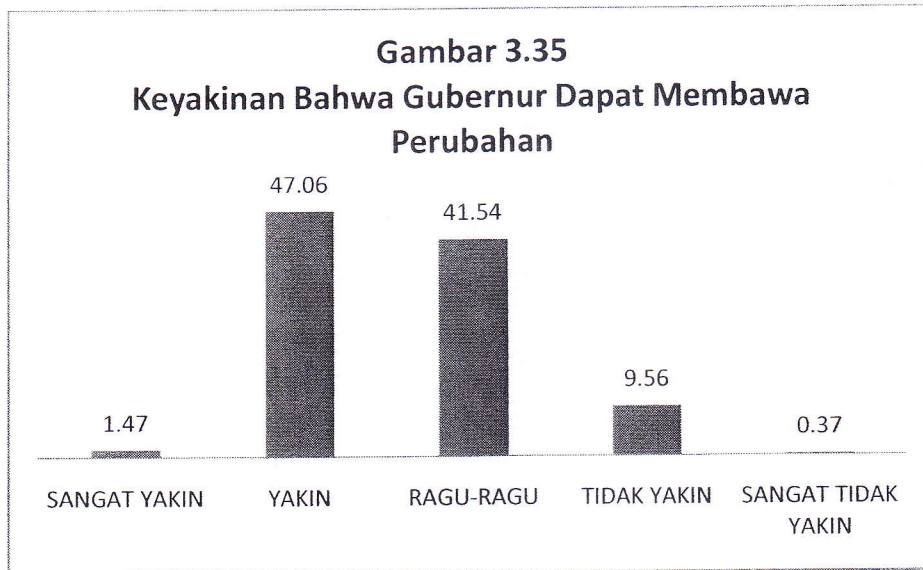
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Begitu juga dengan halnya KPU provinsi Jawa Tengah, Bawaslu provinsi Jawa Tengah juga ikut andil dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun sekali tersebut. 65 persen responden merasa biasa saja dengan kinerja Bawaslu tersebut, 29 persen merasa puas, 5 persen tidak puas dan 1 persen merasa tidak puas dengan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013. Hal tersebut sesuai dengan gambar 3.34 berikut ini.



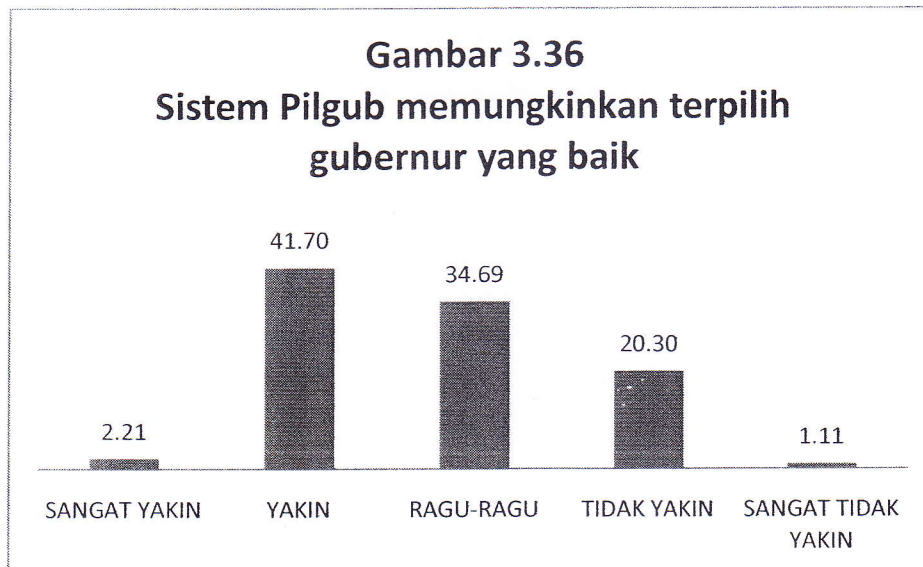
Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Responden dengan prosentase 47,06 persen yakin bahwa Gubernur Ganjar Pranowo dapat membawa perubahan kehidupan masyarakat Jateng yang lebih baik, 41,54 persen ragu-ragu, 9,56 persen tidak yakin, 1,47 persen sangat yakin dan 0,37 persen sangat tidak yakin bahwa gubernur terpilih Ganjar Pranowo mampu membawa perubahan kehidupan masyarakat Jawa Tengah sebagaimana pada gambar 3.35.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

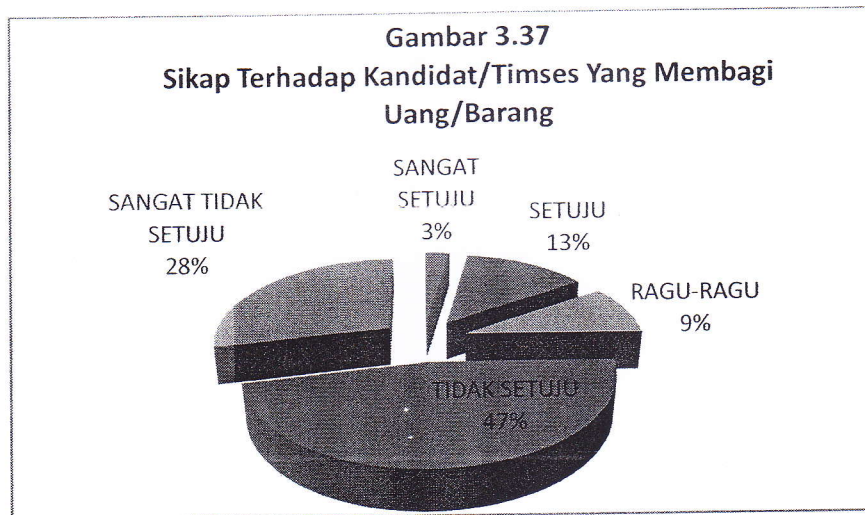
Pendapat masyarakat dalam hal ini responden dalam penelitian ini tentang adanya sistem pemilihan gubernur memungkinkan terpilih gubernur yang baik tergambar pada gambar 3.36 berikut ini. 41,70 persen responden yakin terhadap sistem pilgub tersebut, 34,69 persen ragu-ragu, 20,30 persen tidak yakin, 2,21 persen sangat yakin dan 1,11 persen responden sangat tidak yakin dengan adanya sistem pemilihan gubernur memungkinkan terpilih gubernur yang baik.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

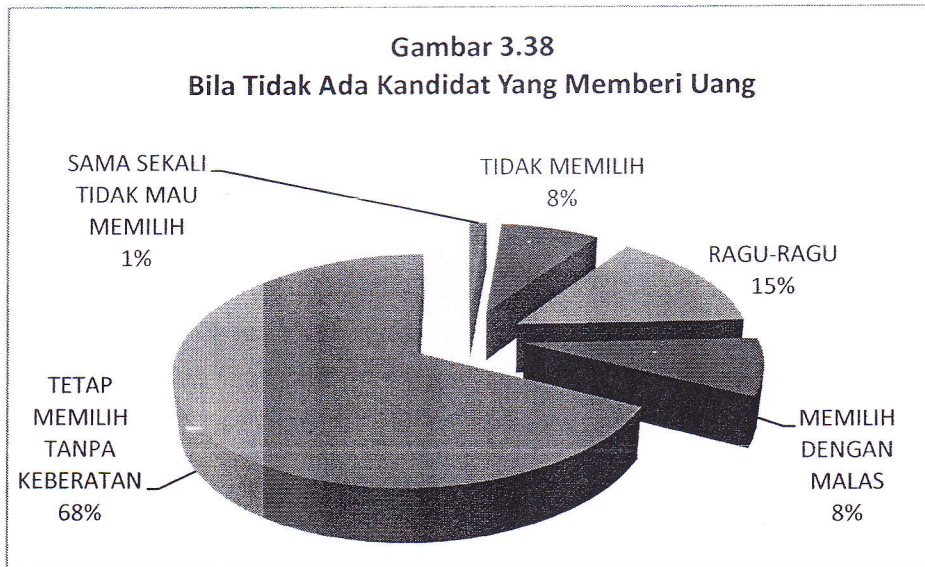
### 3.6.Politik Uang Dalam Pilgub Jateng 2013 – 2018

Adanya pemilihan umum tidak terlepas dengan apa yang namanya politik uang, pandangan responden terhadap hal tersebut 47 persen tidak setuju dengan adanya sistem bagi uang/barang yang dilakukan oleh kandidat/timses pada pilgub Jawa Tengah 2013, 28 persen sangat tidak setuju, 9 persen ragu-ragu, 13 persen setuju dan 3 persen sangat setuju terhadap adanya sistem bagi uang/barang yang dilakukan oleh kandidat/timses pada pilgub Jawa Tengah 2013. Hal tersebut terlihat pada gambar 3.37 berikut.

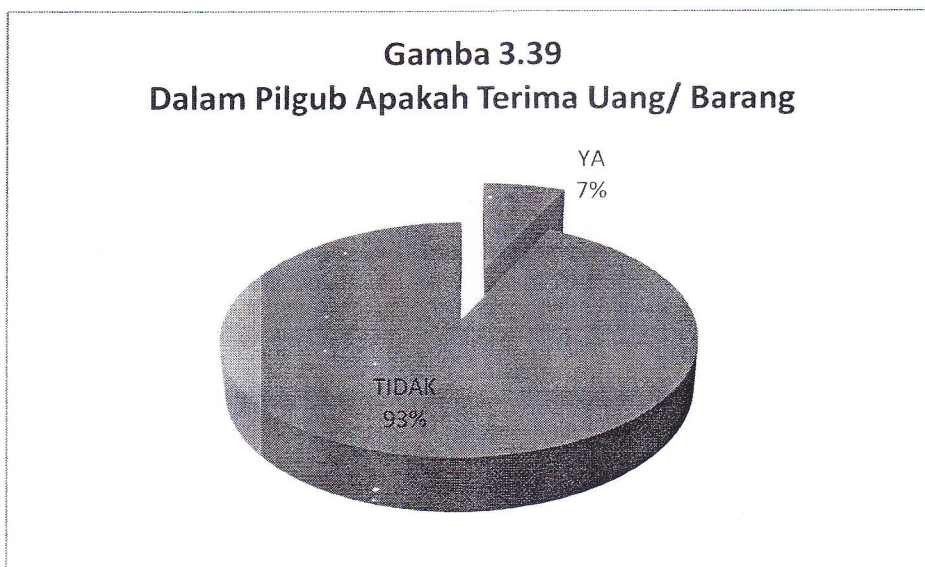


Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Gambar 3.38 menjelaskan sikap masyarakat terhadap sikap memilih atau tidaknya bila tidak ada kandidat yang memberi uang kepada mereka. Sebagian besar responden (68 persen) tetap memilih tanpa keberatan, 15 persen responden ragu-ragu untuk memilihnya, 8 persen responden akan memilih dengan rasa malas dan juga tidak memilih, serta 1 persen responden tidak mau memilih jika tidak ada kandidat yang memberinya uang. Terlihat juga pada gambar 3.39, sebagian besar responden dengan presentase 93 persen tidak menerima uang/barang dari pasangan kandidat atau tim sukses kandidat pada pilgub Jawa Tengah dan selebihnya 7 persen responden menerima uang/barang dari kandidat/tim sukses dalam pilgub Jawa Tengah tahun 2013.

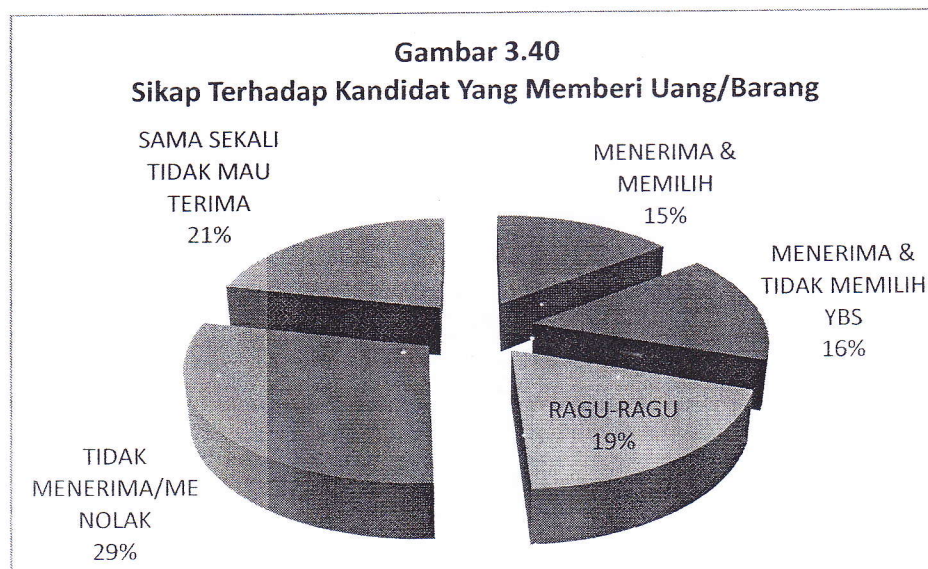


Sumber, diolah dari data penelitian 2013



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

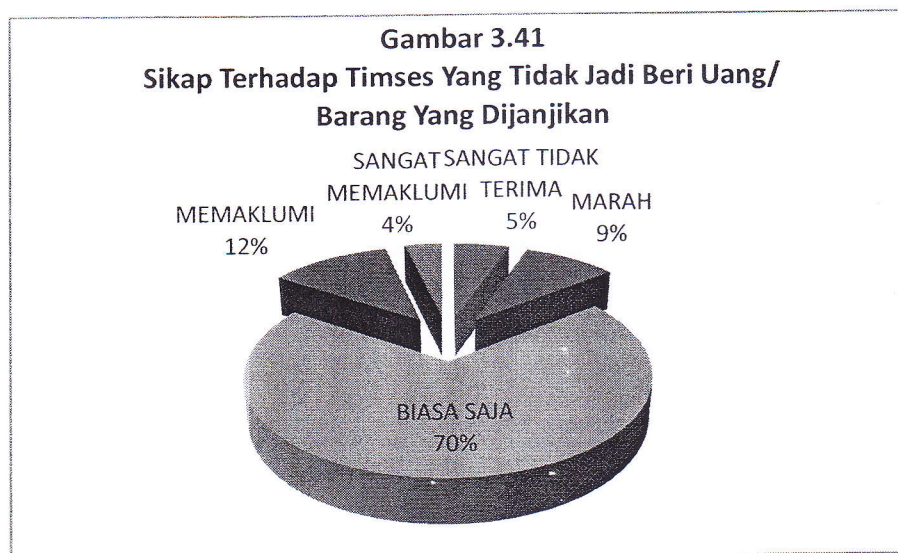
Fenomena politik uang yang dilakukan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 memberikan pandangan tersendiri bagi responden dalam penenilitan ini. Prosentase sikap responden terhadap kandidat yang memberi uang/barang menggambarkan sebesar 29 persen tidak menerima/menolak pemberian tersebut, 21 persen responden sama sekali tidak mau terima, 19 persen ragu-ragu, 16 persen menerima dan tidak memilih yang bersangkutan dan 15 persen menerima dan memilih kandidat yang memberi uang/barang tersebut sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.40.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

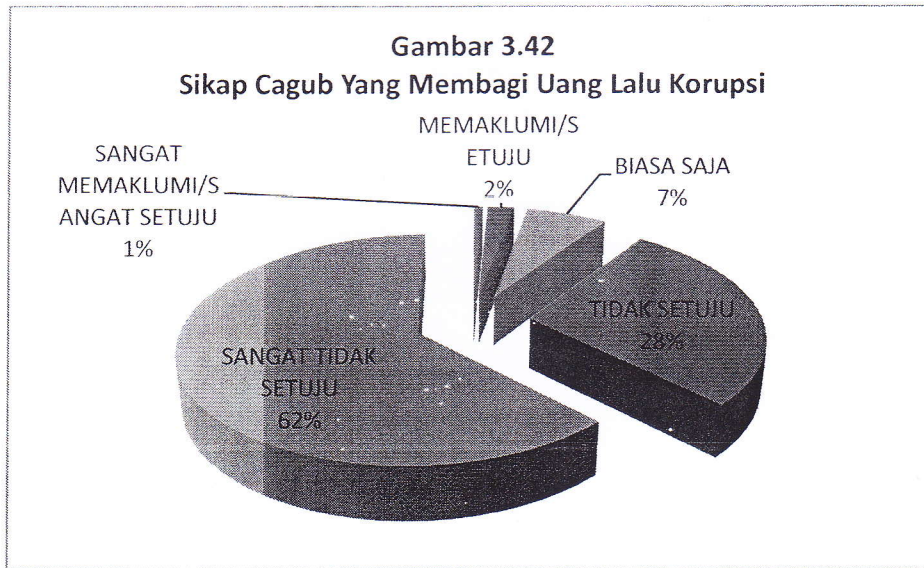
Gambar 3.41 menjelaskan sikap responden terhadap tim sukses yang tidak jadi memberikan uang/barang yang sudah dijanjikan. Sebagian besar responden (70

persen) merasa biasa saja terhadap peristiwa tersebut, 12 persen memakluminya, 9 persen marah, 5 persen sangat tidak terima dan 4 persen sangat memakluminya terhadap tim sukses yang tidak jadi memberikan uang/barang yang sudah dijanjikan.

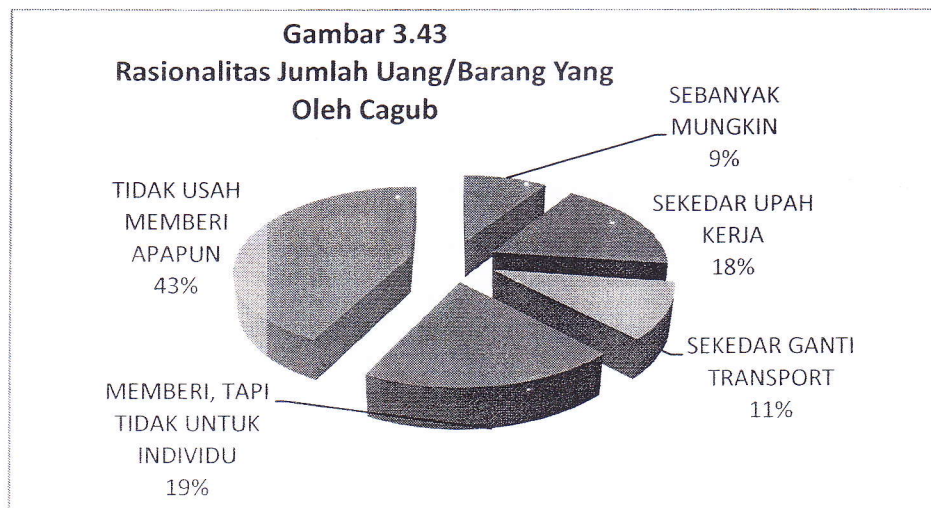


Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Sikap responden terhadap kandidat yang membagi uang/barang dan kemudian korupsi tergambar pada gambar 3.42 yang sebagian besar responden sebesar 62 persen sangat tidak setuju dengan sikap tersebut, 28 persen tidak setuju, 7 persen biasa saja, 2 persen memaklumi (setuju) dan 1 persen sangat memakluminya (sangat setuju) terhadap tindakan kandidat yang sudah membagi uang/barang dan kemudian dia terlibat dalam tindak pidana korupsi.



Sumber, diolah dari data penelitian 2013



Sumber, diolah dari data penelitian 2013

Rasionalitas jumlah uang/barang yang dilakukan oleh pasangan kandidat dalam Pilgub Jawa Tengah 2013 menyebutkan bahwa 43 persen responden tidak usah memberi apapun dalam pelaksanaan pilgub tersebut, 19 persen memberi tapi tidak untuk individu, 18 persen sekadar upah kerja, 11 persen sekadar ganti transport dan 9 persen responden rasionalitas jumlah pemberian sebanyak mungkin sebagaimana tergambar pada gambar 3.43.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Dalam hal partisipasi politik, pemilih di Jawa Tengah mayoritas merupakan pemilih yang tidak memiliki ikatan dengan partai politik secara langsung. Hanya 8 persen pemilih yang merupakan anggota partai politik. Pilihan politik pemilih dalam Pemilu 2009 ditentukan oleh figur pemimpin partai, visi misi program partai, dan anjuran dari tokoh masyarakat.
2. Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan BibitWaluyo dinilai sebagian besar pemilih (53 persen) biasa-biasa saja. Gubernur Bibit Waluyo dinilai tidak mampu memberikan perubahan yang berarti bagi pembangunan JawaTengah.
3. Pengangguran, infrastruktur, dan pelayanan pendidikan merupakan persoalan yang dinilai oleh pemilih harus segera diselesaikan gubernur terpilih.
4. Penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jateng 2013 disebabkan oleh alasan pribadi (sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, harus bekerja),persoalan administratif(tidak terdaftar dalam DPT, tidak mempunyai kartu pemilih) dan persolan idiologis (bosan dengan pemilukada, tidak ada pasangan favorit, dan tidak yakin terhadap proses pemilukada).

5. Dalam Pilgub 2013, tidak ada hubungan yang pasti antara pilihan partai dalam Pileg 2009 dan Pilihan Pasangan dalam Pilgub. Namun demikian, pemilih PDI Perjuangan merupakan pemilih yang paling konsisten dimana mayoritas (81,2 persen) pemilih PDI Perjuangan memilih pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan.
6. Faktor visi, misi dan program kandidat merupakan faktor yang paling banyak berpengaruh bagi pemilih dalam menentukan pilihannya dalam Pilgub 2013. Gubernur terpilih dinilai oleh pemilih memiliki sifat yang sesuai dengan harapannya yakni sifat jujur, bersih, dan bebas KKN. Sebagian besar pemilih tahu akan slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang diusung oleh Ganjar Pranowo.
7. Sampai saat ini, kinerja Ganjar Pranowo belum mampu memuaskan pemilih dimana sebagian besar pemilih masih menilai kinerjanya biasa-biasa saja.
8. Mayoritas pemilih di Jawa Tengah dalam Pilgub merupakan pemilih yang pasif terhadap pemberitaan politik melalui berbagai media dan kampanye.
9. Pemilih menilai bahwa pelaksanaan Pilgub 2013 berjalan dengan baik, dimana 41 persen menilai bersih, dan 52 persen biasa-biasa saja. Demikian halnya dengan kinerja penyelenggara pemilu (KPUD, Bawaslu) yang dinilai biasa-biasa saja oleh pemilih.

10. Mayoritas pemilih tidak setuju dengan praktik politik uang. Dalam Pilgub hanya sedikit dari pemilih (7 persen) yang menerima barang/uang dari tim sukses kandidat.

#### **4.2. Saran**

1. Gubernur Jawa Tengah perlu segera menjawab kepercayaan publik melalui kinerja yang lebih baik khususnya dalam menyelesaikan persoalan pengangguran, infrastruktur, dan pelayanan pendidikan di Jawa Tengah.
2. Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan menyelesaikan persoalan yang membuat pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dan melakukan penindakan yang tegas, upaya antisipatif terhadap praktik politik uang.
3. Dalam proses rekrutmen pejabat publik, partai politik perlu meningkatkan kualitas serta memberikan pendidikan politik yang lebih masif kepada pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apter, E David. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES
- Alvarez, R. Michael, and Roberts, Reginald, 1996, *Campaign Advertising and Candidate Strategi*, California: California Institute of Technology.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asfar, Muhammad, 2006, *Pemilih dan Prilaku Pemilih 1955-2005*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Blais, Andre, et.al, 2001, "Measuring Party Identification: Britain Canada, and the United States", *Political Behaviour*, Vol.23, No.1
- \_\_\_\_\_, 2002, *Does The Local Candidate Matter?* Montreal: Universite de Montral
- Budi, Triton Prawira, 2006, *SPSS 13.0 Terapan, Riset Statistik Parametrik*, Yogyakarta: PENERBIT Andi.
- Budiharjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto, 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS.
- Firmanzah, 2004, *Peranan Ilmu Marketing dalam Dunia Politik: Menuju Marketing Politik di Indonesia Menegemen Usahawan Indonesia* (No.01 ThXXXIII), hal. 3 – 11
- Firmanzah, 2007, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (YOI).
- Gaffar, Afan, 1992, *Javanesa Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harrison, Lisa, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana.
- Johnson , Richard A, and Wichern, Dean W., 2002, *Appilied Multivariate Statistical Analisis 5<sup>th</sup> adition*, Pearson education International.
- Kristadi, Josef, 1993. *Pemilihan Umum dan Prilaku Pemilih* (disertasi) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Kotler, Philip, 2006, *According to Kotler*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Koentjoroningrat, 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.

Lau, Richard R, and Redlask, David P, 2006, *How Voters Decid*, Cambridge University Press, Cambbridge

Marbun, BN, 2003, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Marsh, Michel, 1999, *Candidate Centred but Party Wrapped*: Trinita College, Dublin

Suryana, Daniel, 2008, *Indonesia dalam Transisi Politik, Cet.I*, Bandung Pustaka Sastra..

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*.LP3ES.Yogyakarta.

Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press. Semarang.